

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
(LKj-IP SKPD)



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKj-IP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj-IP SKPD ini didasarkan pada hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Melalui laporan ini, kami berupaya menyajikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pencapaian kinerja tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Praya, 12 Februari 2026
Kepala BAPPERIDA
Kabupaten Lombok Tengah

H. LAJU WIRANATA, S.IP, MA
NIP. 197611232005011006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

RINGKASAN EKSEKUTIF vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 I.1. Tugas, Fungsi Perangkat Daerah 1

 I.2. Data 2

 I.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah 4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 6

 II.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah 6

 II.2. Rencana Kerja Tahunan 13

 II.3. Indikator Kinerja Utama 14

 II.4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 21

 III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21

 III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah 22

 III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategis Perangkat Daerah 26

 III.4. Akuntabilitas Keuangan 61

BAB IV PENUTUP 65

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data kepegawaian BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 2

Tabel 2. Data kepegawaian BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan 2

Tabel 3. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsi 2

Tabel 4. Matriks Tujuan, Sasaran beserta Indikator dan Target Kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 9

Tabel 5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 12

Tabel 6. Program-program utama yang menjadi core business BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah 13

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 15

Tabel 8. Matriks Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 (Perjanjian Kinerja Eselon II) 15

Tabel 9. Perjanjian Kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 pada tataran Eselon III serta Eselon IV 16

Tabel 10. Capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 22

Tabel 11. Realisasi capaian indikator program berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Periode 2021 – 2026 27

Tabel 12. Realisasi capaian kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan 2025 29

Tabel 13. Predikat kinerja berdasarkan hasil e-dalren 38

Tabel 14. OPD berdasarkan bidang perencanaannya 39

Tabel 15. Data penelitian dan pengembangan serta inovasi sampai dengan tahun 2025 60

Tabel 16. Realisasi Anggaran BAPPERIDA Tahun Anggaran 2025 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah	5
Gambar 2. Peran BAPPERIDA dalam Mendukung Pencapaian Visi – Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ..	8
Gambar 3. Kerangka Alur Pikir Penentuan Indikator Outcome Program Utama	14
Gambar 4. Diagram capaian yang sudah terkait kemiskinan dan kemiskinan ekstrim	40
Gambar 5. PDRB Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024	41
Gambar 6. Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020-2024	42

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah memiliki tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang riset dan inovasi daerah.

BAPPERIDA sebagai lembaga teknis perencanaan daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders). Oleh karenanya langkah strategis perlu segera diwujudkan dan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan operasional yang nyata, produktif, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi yang berkembang.

Berangkat dari berbagai tuntutan publik sebagaimana tersebut di atas, BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah diharapkan untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerja Bapperida Kabupaten Lombok Tengah diperlukan adanya Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah guna lebih mengetahui kemampuan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi sebagaimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen-PAN&RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja yang terdiri dari berbagai indikator, mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja yang menyeluruh dan terpadu untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi serta misi organisasi, sekaligus merupakan alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dipergunakan sebagai umpan balik (*feedback*) untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak terkait.

BAPPERIDA yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan dan di bidang Riset Inovasi Daerah serta

penilaian atas pelaksanaannya mempunyai kewajiban menjalankan dan menjadi motor penggerak terhadap visi Kabupaten Lombok Tengah sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan.

Berdasarkan capaian hasil kinerja BAPPERIDA Tahun 2025, rata-rata capaian indikator tujuan memiliki nilai 100%, begitu pula rata-rata capaian indikator sasaran memiliki nilai 100%, sedangkan untuk akuntabilitas keuangan memiliki nilai 97,01%,

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Tugas, Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selanjutnya disingkat BAPPERIDA, memiliki tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang riset dan inovasi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, BAPPERIDA mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pengkoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

I.2. Data

Berdasarkan data kepegawaian BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025, kondisi pegawai dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data kepegawaian BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025

No	JENIS KELAMIN	A S N			NON ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN (%)	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN (%)	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Laki-Laki	26	54,16	44,82	8	80	13,79
	Perempuan	22	45,84	37,93	2	20	3,44
	Jumlah	48	100	82,75	10	100	17,24
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN)		58					

Kondisi data kepegawaian BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Data kepegawaian BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan

No	JENJANG PENDIDIKAN	A S N			NON ASN		
		Jml. Peg.	Persentase Terhadap ASN (%)	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jml. Peg.	Persentase Terhadap Non ASN (%)	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	S2	13	27,08	22,41	-		
2	S1	28	58,33	48,28	3	30	5,17
3	D3	-	-	-	1	10	1,72
4	SMA / SMK / MA	7	14,58	12,07	5	50	8,62
5	SD/SMP	-	-	-	1	10	1,72
	Jumlah	48	100	82,76	10	100	17,25
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		58					

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsi dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsi

JENIS PERALATAN		JUMLAH	KETERANGAN
Alat Alat Angkutan	Kendaraan Roda 4	9 Unit	1 Unit Rusak Berat
	Kendaraan Roda 2	59 Unit	22 Unit Mutasi + Lelang
			16 Unit Kondisi Baik
			21 Unit Rusak Berat
Alat Studio dan Alat Komunikasi		20 Unit	Kondisi Baik

Perencanaan pembangunan daerah ke depan ditujukan untuk mewujudkan lembaga perencanaan pembangunan yang mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Terkait dengan hal tersebut, BAPPERIDA harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul:

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
2. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
3. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
4. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;
5. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPERIDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: RTRW, RDTR, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Beberapa permasalahan pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam inovasi daerah;

2. Keterlambatan Perangkat Daerah atau *stakeholders* terkait atas penyampaian data perencanaan.

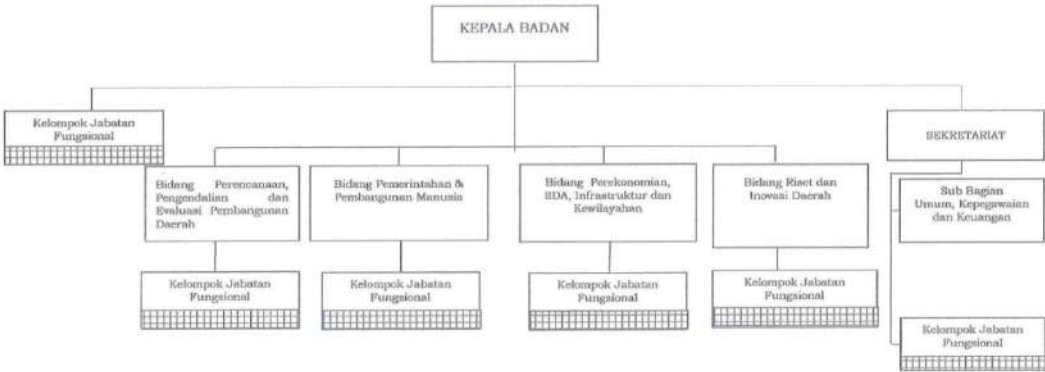
I.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah, struktur organisasi BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari:

1. **Kepala Badan**, mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang riset dan inovasi daerah.
2. **Sekretaris Badan**, dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
 - a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, perlengkapan dan penatakelolaan keuangan.
3. **Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
4. **Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat desa, tenaga kerja dan transmigrasi,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan sumber daya manusia, keuangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat Daerah dan unsur kewilayahan.

- 5. **Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan reneana, pengkoordinasian,pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika,persandian, dan statistik.
- 6. **Kepala Bidang Bidang Riset dan Inovasi Daerah** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyaitugas melaksanakan kebijakan, koordinasi,sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah, dan melaksanakan penyusunan .rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- 7. **Jabatan Fungsional**, Pada lingkup Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 1. Struktur organisasi BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra BAPPERIDA harus sejalan dengan pencapaian Visi – Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG
BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA
(BERSATU JAYA)”**,

Makna dari Visi tersebut adalah:

1. Beriman merupakan gambaran utuh jiwa Akhlaqul Karimah masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
2. Sejahtera menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
3. Bermutu merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
4. Maju memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
5. Berbudaya dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (*The Heart of Lombok*).

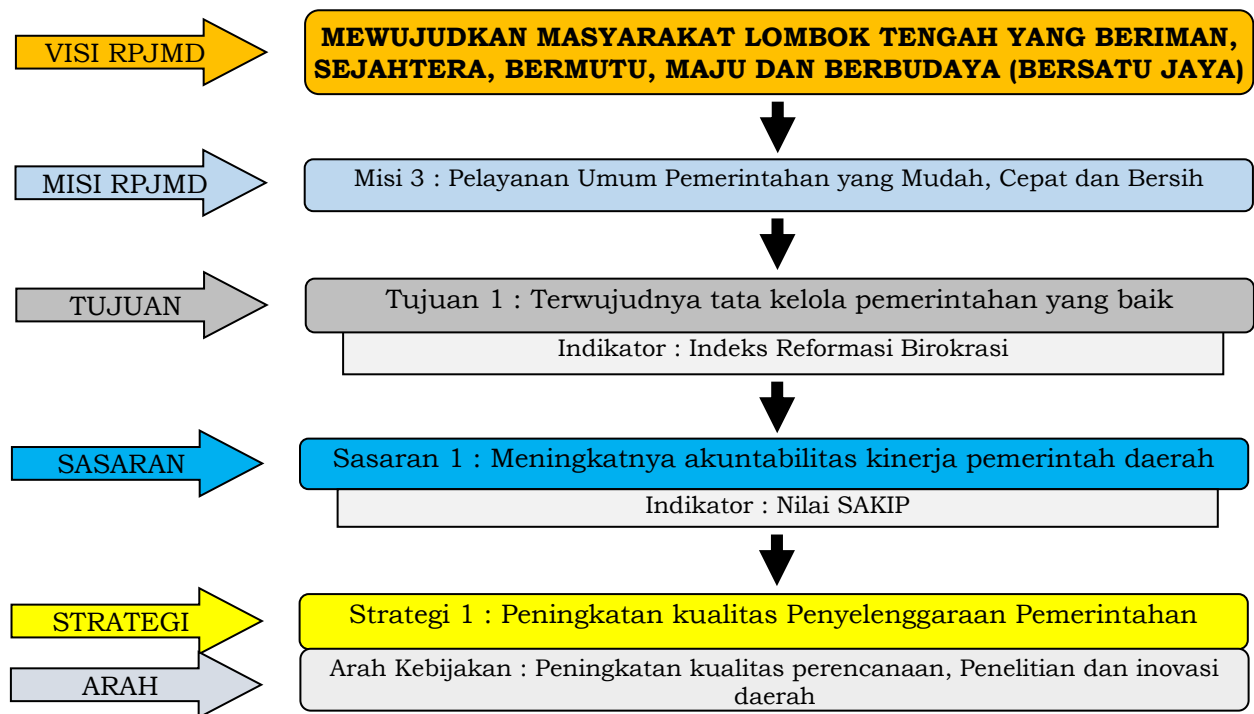
Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat; Bermakna terwujudnya masyarakat yang bersandar pada nilai agama

melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis antar umat, moderasi beragama dan menekan kasus penyalahgunaan narkoba.

2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul; Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global. Penguatan sumber daya manusia ini ditopang dalam dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, sumber daya manusia di arahkan untuk menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan dengan terbukanya kesempatan mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk semua orang. Dalam aspek kesehatan, sumberdaya manusia yang unggul dapat digambarkan dengan tingginya derajat kesehatan yang diharapkan dapat terwujud untuk membentuk sumber daya manusia yang mandiri.
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih; Mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan public ke masyarakat yang efektif dan efisien.
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas; Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan dan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan antar wilayah.
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur; Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan luhur daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yang diturunkan kedalam Renstra BAPEPRIDA Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan tujuan utama yaitu mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 2. Peran BAPPERIDA dalam Mendukung Pencapaian Visi – Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

Berdasarkan hasil telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026; isu-isu strategis BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah; serta tugas dan fungsi BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah; dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada RENSTRA Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, yaitu:

“MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH”

Indikator dari tercapai atau tidaknya tujuan tersebut dapat terlihat dari ketercapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Berkaitan hal tersebut maka ditetapkan 3 (tiga) indikator tujuan dari BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

1. Indeks Inovasi Daerah;
2. Persentase Ketercapaian IKU Kabupaten > 90%;
3. Persentase perencanaan OPD Baik.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun

waktu tertentu secara berkesinambungan. Dimana untuk pencapaian tujuan Bapperida Kabupaten Lombok Tengah, yaitu dengan mempertimbangan tugas fungsi BAPPERIDA serta aturan-aturan terkait perencanaan, penelitian dan pengembangan, maka ditetapkan sasaran dalam RENSTRA Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yaitu :

- 1. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Program Prioritas Daerah;
- 2. Meningkatnya Keselarasan dan sinergi Perencanaan Daerah;
- 3. Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas;

Berikut tabel tujuan, sasaran dan target kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Tabel 4. Matriks Tujuan, Sasaran beserta Indikator dan Target Kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Sangat Inovatif Predikat	Sangat Inovatif Predikat
		Persentase Ketercapaian IKU Kabupaten > 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perencanaan OPD Baik	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Program Prioritas Daerah	Persentase Keselarasan Prioritas Daerah dengan Sasaran RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase keselarasan kinerja program prioritas OPD dengan prioritas daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentasae OPD Dengan Rata-Rata Capaian Kinerja Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Keselarasan dan sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Renstra Dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Persentase Keselarasan Renja dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Persentase Inovasi Daerah yang dimanfaatkan dan/atau yang direplikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya perlu disusun strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Dalam Renstra BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, strategi dan arah kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPERIDA, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Lombok Tengah. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian tujuan yang akan dicapai pada Renstra Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah”**, rumusan strategi dan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

1. Pengoptimalan koordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah. Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu meningkatkan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang didukung pengendalian dan evaluasi serta penyediaan data informasi kebutuhan perencanaan. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah dan program pengembangan data dan informasi.
2. Pengoptimalan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pencapaian target kinerja pembangunan.

3. Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
 - Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam). Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sda (sumber daya alam).
 - Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
 - Pengoptimalan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu mewujudkan penelitian dan pengembangan yang aplikatif bagi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya, serta fisik prasarana dan lingkungan. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, dan program penelitian dan pengembangan daerah dengan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan

pengkajian peraturan, penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi informasi dalam berbagai aspek secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga upaya pencapaian tujuan dan sasaran BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

VISI		MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"	
MISI 3		Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih; Mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan public ke masyarakat yang efektif dan efesien	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Program Prioritas Daerah	Sinkronisasi Dan Sinergitas Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Kegiatan	Peningkatan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Serta Sistem Pengawasan Sebagai Umpan Balik Bagi Perencanaan
	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Sinkronisasi Dan Sinergitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Ketersediaan Data Dan Informasi Yang Akurat, Relevan Dan Terkini Dengan Membangun Koneksi Data Perangkat Daerah Untuk Mendukung Proses Perencanaan Pembangunan
	Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Menetapkan Regulasi Untuk Pemanfaatan Kajian Yang Dibuat	Mengembangkan Penelitian Dan Pengembangan Berdasarkan Permasalahan Pembangunan

Hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana dijelaskan tersebut diatas tetap dipedomani dalam penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Selanjutnya dilakukan penyusunan rencana program dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran maupun untuk pemenuhan layanan Bapperida dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Rencana program dilengkapi outcome program beserta target capaiannya, demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi output kegiatan beserta target capaiannya.

II.2. Rencana Kerja Tahunan

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan beserta indikatornya memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja, dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan beserta indikatornya juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah, dalam hal ini disesuaikan dengan susunan organisasi Bapperida Kabupaten Lombok Tengah, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

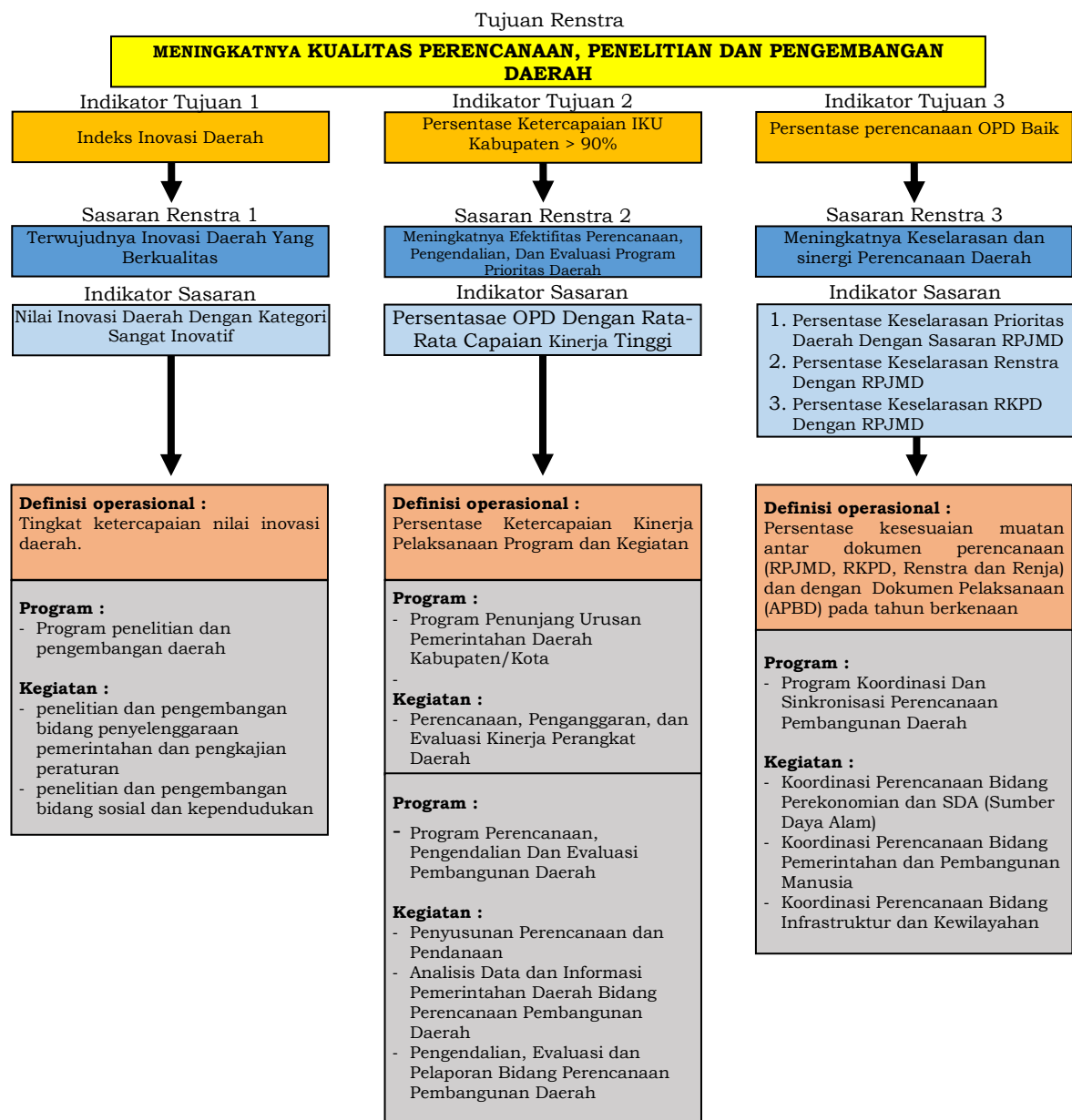
Pada Renstra Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan jangka menengah yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah”, serta dengan sasaran yaitu Meningkatkan Efektivitas Evaluasi Dan Pengendalian, Meningkatkan Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah Dan Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan program-program utama yang menjadi *core business* BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

Tabel 6. Program-program utama yang menjadi core business BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah

NO	PROGRAM	OUTCOME	TARGET
1	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dan SDA dengan RKPD	100%
		Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	100%
		Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang P2M dengan RKPD	100%
		Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Ekonomi dan SDA	100%
		Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%
		Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang P2M	100%
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%
		Persentase Kesesuaian Program pada Renstra dengan RPJMD	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Monev yang di Tindaklanjuti	100%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	24%

Adapun kerangka alur pikir dalam penentuan indikator outcome dari masing-masing program utama dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran tersaji pada gambar sebagai berikut.



Gambar 3. Kerangka Alur Pikir Penentuan Indikator Outcome Program Utama

II.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama selanjutnya disingkat IKU, merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

IKU ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan IKU BAPPERIDA Tahun 2021-2026 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA AKHIR 2026
1	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat
2	Persentase Ketercapaian IKU Kabupaten > 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase perencanaan OPD Baik	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%

II.4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Pada tahun 2025 BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah, serta dari Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah kepada pimpinan yang lebih rendah secara berjenjang untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja Sasaran Strategis yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan serta mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.

Adapun indikator kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2025 pada tataran Eselon II (Kepala BAPPERIDA) adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Matriks Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 (Perjanjian Kinerja Eselon II)

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Program Prioritas Daerah	Persentase Keselarasan Prioritas Daerah Dengan Sasaran RPJMD	100%
	Persentase keselarasan kinerja program prioritas OPD dengan prioritas daerah	100%
	Persentasae OPD Dengan Rata-Rata Capaian Kinerja Tinggi	100%

Meningkatnya Keselarasan dan sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Renstra dengan RPJMD	100%
	Persentase Keselarasan Renja dengan RKPD	100%
Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Persentase inovasi daerah yang dimanfaatkan dan/atau yang direplikasi	100%

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut kemudian ditetapkan Perjanjian Kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 pada tataran Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang pada BAPPERIDA) serta Eselon IV (Kepala Sub Bagian pada BAPPERIDA) sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 9. Perjanjian Kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 pada tataran Eselon III serta Eselon IV

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	100%
	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	100%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	2 Dokumen
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen
- Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara
- Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara
- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Dokumen
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	30 Orang
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembnagunan Daerah	2 Dokumen
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Laporan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
- Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen
- Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen
- Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD	100%
	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD	100%
	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD	100%
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Ekonomi	100%
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur	100%
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang SP2M	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	11 Laporan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Perekonomian dan SDA	8 Dokumen
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	1 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen perencanaan, dokumen movev dan dokumen harmonisasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	24 %
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknolog	1 Dokumen
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen
- Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelaporan	100%
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100%
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang / bulan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Notulen Rapat	12 Laporan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang penunjang pemerintah daerah	100%
- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah kondis baik	90%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran evaluasi kinerja diperoleh melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan serta akuntabilitas organisasi. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target).

Adapun capaian kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2025 didapatkan melalui pengukuran terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

Hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya

Capaian Kinerja

=

Realisasi

Target

x 100 %

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya

Capaian Kinerja

=

Target - (Realisasi - Target)

Target

x 100 %

Skala pengukuran capaian kinerja berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) 90 < x = Sangat Tinggi
- 2) 75 < x ≤ 90 = Tinggi
- 3) 65 < x ≤ 75 = Sedang
- 4) 50 < x ≤ 65 = Rendah
- 5) X ≤ 50 = Sangat Rendah

III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 didapatkan melalui pengukuran terhadap Perubahan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Rencana Strategis BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021–2026, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 10. Capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Capaian Kinerja (n-1)			Target dan Realisasi Capaian Kinerja (n)		
					Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1.a	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	%	Sangat Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Sangat Inovatif Predikat	100	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	100
1.b		Persentase Ketercapaian IKU Kabupaten > 90%	%	100	100	100	100	100	100	100
1.c		Persentase perencanaan OPD Baik	%	100	100	90	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Indikator Tujuan										100
Peringkat Capaian Kinerja										A
1.1.a	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Program Prioritas Daerah	Persentase Keselarasan Prioritas Daerah Dengan Sasaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100
1.1.b		Persentase keselarasan kinerja program prioritas OPD dengan prioritas daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
1.1.c		Persentasae OPD Dengan Rata-Rata Capaian Kinerja Tinggi	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.a	Meningkatnya Keselarasan dan sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Renstra Dengan RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.b		Persentase Keselarasan Renja dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
1.3.a	Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Persentase Inovasi Daerah yang dimanfaatkan dan/atau yang direplikasi	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran										100
Peringkat Capaian Kinerja										A

Berdasarkan tabel Capain Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), BAPPERIDA berhasil mempertahankan capaian kinerja perangkat daerah tahun 2024 dan 2025 dengan capaian kinerja yaitu 100%. Keberhasilan yang telah diraih akan dijadikan sebagai standar minimal (baseline) dalam pelaksanaan program kerja pada tahun anggaran berikutnya sehingga upaya mempertahankan capaian kinerja ini dilakukan dengan terus mengoptimalkan sinergi antarbidang dan penggunaan sumber daya.

Adapun perhitungan dan capaian indikator tujuan sebagai berikut:

1.a. Indeks Inovasi Daerah

Perhitungan Nilai Indeks Inovasi Daerah berdasarkan dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 6097 Tahun 2025 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025. Penilain Indeks Inovasi Daerah ada pada lampiran kategori Kabupaten Nomor 72. Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai 64,20 dengan kategori Inovatif.

1.b. Persentase Ketercapaian IKU Kabupaten > 90 %

Indikator ini dapat dicapai dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ IKU\ Kabupaten\ yang\ tercapai\ >\ 90\ \%}{Jumlah\ IKU\ Kabupaten} \times 100\ \%$$

Perolehan nilai capaian ini pada tahun 2025 adalah 100%. Angka 100% menunjukkan bahwa seluruh IKU Kabupaten yang ditetapkan telah berhasil melampaui ambang batas ketercapaian 90%. Hal ini merefleksikan keberhasilan BAPPERIDA dalam menjalankan fungsi asistensi, koordinasi, dan sinkronisasi program prioritas di tingkat Kabupaten Lombok Tengah. Capaian 100% yang konsisten membuktikan bahwa sistem perencanaan di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan dengan baik dalam hal keselarasan antara target dan realisasi. Namun, tantangan utama bagi BAPPERIDA di tahun berikutnya adalah mempertahankan performa ini di tengah perubahan nomenklatur dan tuntutan strategi yang lebih inovatif untuk memastikan setiap IKU yang tercapai memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

1.c Persentase perencanaan OPD Baik

Indikator ini dapat dicapai dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{OPD\ yang\ sudah\ diasistensi\ dokumen\ perencanaan}{Jumlah\ OPD} \times 100\ \%$$

Perolehan capaian indikator yaitu 100%. Detail bukti dukung terdapat pada Lampiran Daftar Perangkat Daerah Yang Sudah Melakukan Asistensi Dokumen Perencanaan. BAPPERIDA berfungsi sebagai fasilitator dan pembina untuk menjamin dokumen rencana kerja (Renja) setiap OPD memiliki kualitas yang selaras dengan isu strategis dan program prioritas daerah. Pencapaian 100% ini didorong oleh asistensi penyelarasan dokumen yang intensif oleh BAPPERIDA, di mana OPD diarahkan untuk melakukan pemetaan capaian indikator berdasarkan program prioritas pembangunan daerah.

1.1.a. Persentase Keselarasan Prioritas Daerah dengan Sasaran RPJMD

Indikator ini dapat dinilai dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Prioritas Daerah Tahun Berjalan}}{\text{Sasaran RPJMD Tahun Berjalan}} \times 100 \%$$

Perolehan capaian yaitu sebesar 100%, bukti dukung ada pada Lampiran Rincian Kesesuaian Data Program dan Kegiatan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh program prioritas yang disusun dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah telah mengacu secara konsisten pada sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

1.1.b. Persentase keselarasan kinerja program prioritas OPD dengan prioritas daerah

Indikator ini dapat dinilai dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Program prioritas OPD}}{\text{Prioritas Daerah}} \times 100\%$$

BAPPERIDA melakukan asistensi terkait penyelarasan program prioritas Perangkat Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Bukti dukung ada pada Lampiran Rincian Kesesuaian Data Program dan Kegiatan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2025. BAPPERIDA melakukan asistensi yang intensif terkait dengan keselarasan kinerja program prioritas OPD dengan prioritas daerah serta dengan

pemanfaatan Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang sebagai wadah penajaman kesesuaian program dengan arah kebijakan RPJMD.

1.1.c. Persentase OPD Dengan Rata-Rata Capaian Kinerja Tinggi

Indikator ini dapat dinilai dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah OPD dengan capaian kinerja tinggi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, indikator ini mendapat nilai 100%. Bukti dukung ada pada Lampiran Rekap Evaluasi Dan Pengendalian Perencanaan Pada Aplikasi E-Dalren Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.

1.2.a. Persentase Keselarasan Renstra Dengan RPJMD

Formulasi perhitungan indikator sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang sudah diasistensi Dokumen Renstra}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

BAPPERIDA melakukan melakukan asistensi penyelarasan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah, sehingga mendapatkan nilai 100%. Detail bukti dukung terdapat pada Lampiran Daftar Perangkat Daerah Yang Sudah Melakukan Asistensi Dokumen Perencanaan.

1.2.b. Persentase Keselarasan Renja dengan RKPD

Formulasi perhitungan indikator ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang sudah diasistensi Dokumen Renja}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

Indikator ini dinilai dengan melakukan asistensi penyelarasan antara Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan RKPD Kabupaten Lombok Tengah, sehingga didapatkan nilai 100%.

1.3.a. Persentase Inovasi Daerah yang dimanfaatkan dan/atau yang direplikasi

Indikator ini dinilai dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah inovasi yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

Bukti dukung ada pada Lampiran Persentase perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian Dari program Kegiatan Kabupaten Lombok Tengah 2025. Hal ini bisa dicapai salah satunya dengan menyusun regulasi yang lebih kuat untuk mewajibkan replikasi inovasi unggulan di tingkat desa atau antar-OPD. Optimalisasi Klinik

SINOVA menjadikan klinik ini sebagai pusat pertukaran ide yang lebih agresif untuk menjawab permasalahan pembangunan melalui solusi inovatif.

Berdasarkan perhitungan Indikator Tujuan pada BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah memiliki peringkat capaian kinerja “**sangat tinggi**” sebesar **100%**. Demikian pula dengan perhitungan indikator sasaran, dengan capaian kinerja “**sangat tinggi**” sebesar **100%**.

III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategis Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian setiap indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 11. Realisasi capaian indikator program berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Periode 2021 – 2026

PROGRAM	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Kinerja Program Prioritas OPD dengan Prioritas Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keselarasan Renja dengan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAM	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	Renstra Bidang Ekonomi											
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang SP2M	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian ini didorong oleh proses sinkronisasi dan harmonisasi yang intensif antara BAPPERIDA dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik secara horizontal maupun vertikal. BAPPERIDA melakukan asistensi penyelarasan secara mendetail untuk memastikan bahwa nomenklatur program dan kegiatan pada dokumen Renstra OPD selaras dengan RPJMD, serta dokumen Renja selaras dengan RKPD. Hal ini untuk menjamin bahwa program yang dijalankan oleh OPD mendukung prioritas pembangunan daerah.

Penggunaan berbagai aplikasi sistem informasi menjadi faktor pendorong utama dalam memantau dan mengevaluasi kinerja secara real-time seperti sim-bapperida yang digunakan sebagai alat bantu utama bagi OPD untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan evaluasi Renja secara berkala, yang memudahkan identifikasi kendala sejak dini. SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) membantu dalam perencanaan dan penyiapan data perencanaan yang lebih akurat. KRISNA & SIPPa yang digunakan khusus untuk mengawal pengusulan dan perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi capaian kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan 2025 pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Realisasi capaian kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2024 (n-1)		Tahun 2025 (n)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Kinerja Program Prioritas OPD dengan Prioritas Daerah	100%	100%	100%	100%
	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dok	1 Dok	2 Dokumen	2 Dokumen
- Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara
- Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara
- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembnagunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2024 (n-1)		Tahun 2025 (n)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
- Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD	100%	100%	100%	100%
	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD	100%	100%	100%	100%
	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Ekonomi	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang SP2M	100%	100%	100%	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen perencanaan, dokumen money dan dokumen harmonisasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	11 Laporan	11 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	11 Laporan	11 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	11 Laporan	11 Laporan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	11 Laporan	11 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	11 Laporan	11 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	11 Laporan	11 Laporan
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen perencanaan, dokumen money dan dokumen harmonisasi bidang Perekonomian dan SDA	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2024 (n-1)		Tahun 2025 (n)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen perencanaan, dokumen money dan dokumen harmonisasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen	8 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2024 (n-1)		Tahun 2025 (n)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	21 %	21 %	24 %	24 %
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknolog	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	BB Predikat	B Predikat	BB Predikat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelaporan	100%	100%	100%	100%
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang / bulan	55 orang / bulan	55 orang / bulan	55 orang / bulan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2024 (n-1)		Tahun 2025 (n)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Notulen Rapat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang penunjang pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%
- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah kondis baik	90%	90%	90%	90%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

Penjabaran dan analisa capaian kinerja dan yang ada pada tabel diatas sebagai berikut:

1. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PROGRAM PRIORITAS DAERAH

A. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pada program ini, terdapat dua outcome yang menjadi kinerja program. Adapun penjabaran dari masing-masing kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Keselarasan Kinerja Program Prioritas OPD dengan Prioritas Daerah

BAPPERIDA melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program prioritas OPD dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Proses ini dilakukan melalui:

- Konsultasi dan koordinasi lintas OPD untuk memastikan kesesuaian program dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah.
- Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja yang menekankan keterkaitan antara output OPD dengan outcome daerah.
- Penguatan peran inovasi dan riset dalam mendukung program prioritas, sehingga program yang dijalankan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa sebagian besar program prioritas OPD telah selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Hal ini mencerminkan efektivitas koordinasi perencanaan serta komitmen OPD dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

b. Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD

Penyusunan dokumen RKPD telah dilakukan dengan mengacu pada dokumen RPJMD. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang menekankan kesesuaian program dengan arah kebijakan RPJMD dan koordinasi antar-OPD untuk memastikan program yang diusulkan dalam RKPD mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD.

Penjabaran capain kinerja kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyusun analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang merupakan bagian dari Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Dokumen RPJMD 2025-2029, selain itu dokumen yang dihasilkan berupa dokumen Koordinasi Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Daerah Pembangunan Daerah, Meta Data Indikator Pembangunan Daerah, Peta Jalan Pencapaian Target Pembangunan Manusia, Peta Jalan Pencapaian Target Pengentasan Kemiskinan, Peta Jalan Pencapaian Target Reformasi Birokrasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah dalam pemenuhan data yang dibutuhkan sering terlambat.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah terus aktif berkoordinasi dengan produsen data dalam hal ini perangkat daerah dan juga instansi vertikal, baik itu melalui surat menyurat, komunikasi aktif dan melakukan kunjungan secara langsung.

2) Pelaksanaan Konsultasi Publik

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Forum konsultasi publik yang dilaksanakan adalah Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2026 dan RPJMD 2025-2029. Indikator kinerja yang ditargetkan dan dicapai adalah 2 Berita

Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bapperida dan perwakilan peserta yang hadir.

Tidak terdapat kendala/permasalahan dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

3) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Permendagri 86 Tahun 2017. Hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029. Hasil pembahasan/masukan dirumuskan dalam 2 berita acara kesepakatan.

Tidak ada kendala/permasalahan dalam pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

4) Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan. Target dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5) Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator kinerja dari Sub Kegiatan ini yaitu Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen yang disusun adalah Analisis IPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dan Analisis Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025. IPM dan Kesejahteraan Rakyat merupakan indikator makro dan indikator kinerja daerah, sehingga dokumen hasil analisisnya digunakan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pencapaian target kinerja, ditetapkan Tim Pelaksana/Penyusun yang berasal dari Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah dengan Keputusan Bupati.

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan untuk membiayai Tim Pelaksana dalam menyusun dokumen Analisis IPM dan Analisis Kesejahteraan Rakyat. Juga untuk pelaksanaan workshop/seminar kedua dokumen tersebut.

6) Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Melaksanakan aktivitas pembinaan kepada semua perencana/petugas/operator perangkat daerah yang menangani *e-planning* yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Pembinaan meliputi sosialisasi dan konsultasi dalam penyiapan dan pemanfaatan SIPD. Dilaksanakan juga pengembangan e-dalren dalam rangka penyampaian laporan kinerja perangkat daerah dengan sistem kontrak kerja konsultan individu.

7) Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota

Subkegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

8) Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang berupa Laporan Evaluasi RKPD dan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah. Aktivitas yang dilaksanakan yaitu monitoring pelaksanaan pembangunan daerah, rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah Tahun 2025 dan penyusunan laporan secara berkala baik laporan triwulan untuk pelaksanaan renja perangkat daerah maupun laporan semesteran untuk evaluasi pelaksanaan RKPD. Untuk membantu proses evaluasi dan penyusunan laporan dikembangkan aplikasi e-dalren yang dapat digunakan sebagai alat bantu perangkat daerah dalam menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan renja tahun bersangkutan.

Adapun hasil terakhir yang didapatkan dari e-dalren sebagai berikut:

Tabel 13. Predikat kinerja berdasarkan hasil e-dalren

Predikat Kinerja	Jumlah PD	%	Ket
Sangat Tinggi	34	75,65	
Tinggi	8	17,78	
Sedang	1	2,22	Proses entri
Rendah	2	4,44	Proses entri
Total	45	100	
Rata-rata Kabupaten	93,69		

Kendala/Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a) Perangkat Daerah belum sepenuhnya tepat waktu dalam penyampaian laporan melalui e-dalren;
- b) Masih adanya perbedaan interpretasi/pemahaman terhadap pengisian e-dalren, sehingga terlihat capaian dalam laporan yang kurang sesuai;

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain :

- a) Berkoordinasi dan berkomunikasi secara aktif dengan semua perangkat daerah untuk menyampaikan laporan tepat waktu;
- b) Melakukan pembinaan dan klarifikasi secara langsung dengan perangkat daerah bersangkutan;
- c) Membuat tutorial penginputan laporan melalui e-dalren;

B. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Outcome dari program ini terdiri dari 8 outome yaitu terdiri dari:

- 1) Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD
- 2) Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD
- 3) Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD
- 4) Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Ekonomi
- 5) Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur
- 6) Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang SP2M

Capaian outcome diatas didapatkan melalui proses koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan masing-masing OPD sesuai dengan bidang perencanaannya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 14. OPD berdasarkan bidang perencanaannya

Bidang	Jumlah OPD
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	31
Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5
TOTAL	44

Penjabaran masing-masing kinerja sebagai berikut:

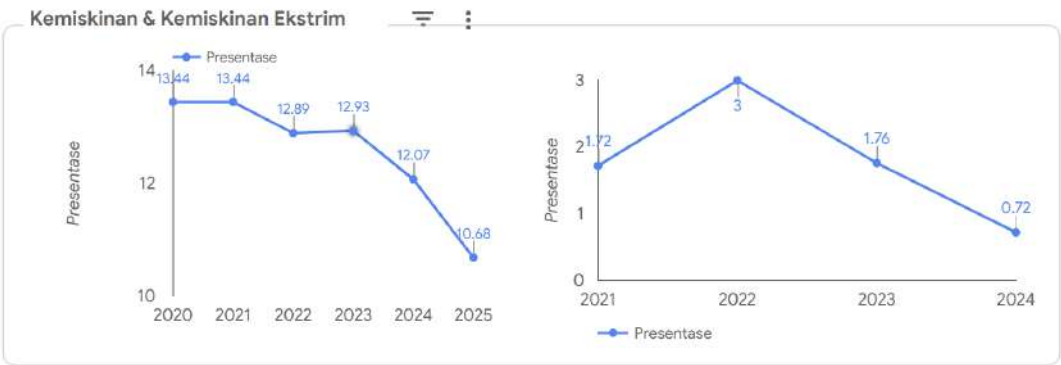
- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Aktifitas pada sub kegiatan ini berupa koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan ini untuk memastikan terwujudnya keselarasan dan sinergisitas antar dokumen perencanaan. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek atau Rencana Kerja (RENJA) yang disusun oleh Perangkat Daerah dipastikan selaras dengan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Keselarasan tersebut terkait dengan indikator strategis dan program strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan di atas.

Selain itu dalam sub kegiatan ini terdapat aktifitas untuk mendukung kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). BAPPERIDA selaku pemangku tugas Kesekretariatan TKPKD Kabupaten Lombok Tengah, berperan dalam mengkoordinasikan perencanaan, monitoring pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, bahwa salah satu tugas dan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) adalah menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tahun 2025, menyusun dan mengirim Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) secara periodik, yaitu setiap 3 bulan dan laporan akhir kepada Gubernur dan Kemenko PMK.

Berikut adalah diagram capaian yang sudah terkait kemiskinan dan kemiskinan ekstrim:



Gambar 4. Diagram capaian yang sudah terkait kemiskinan dan kemiskinan ekstrim

2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Fokus aktifitas dalam sub kegiatan ini adalah pendampingan dan asistensi bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan perangkat daerah, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, BAPPENDA, dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu.

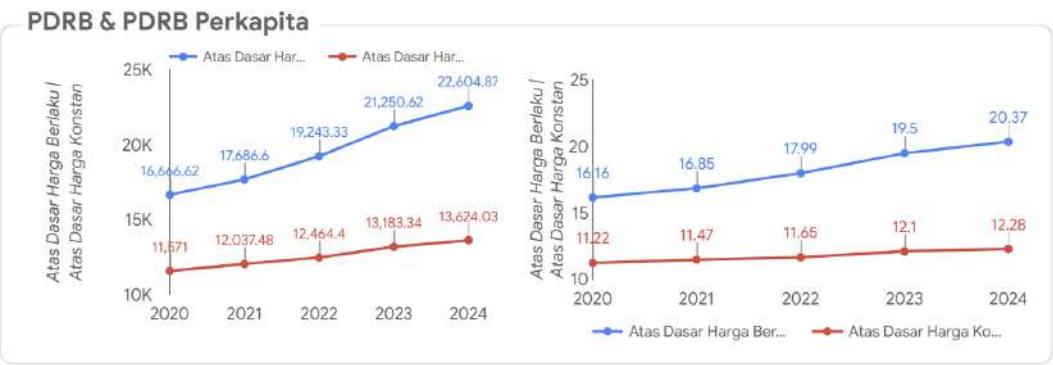
Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan pembangunan sangat ditentukan oleh ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan seperti rencana kerja yang memiliki kualitas yang baik sesuai dengan isu strategis, arah kebijakan dan kerangka program prioritas yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Dalam melakukan asistensi ini, perangkat daerah diarahkan untuk melakukan pemetaan terhadap capaian indikator dari target-target program kegiatan pembangunan pada tahun sebelumnya. Hal ini penting agar dapat dilakukan identifikasi terhadap indikator-indikator yang telah tercapai dan yang belum mencapai target. Dengan demikian nantinya diharapkan akan dapat dilakukan pemetaan mengenai program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Hasil dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu tersusun dan tersedianya dokumen rencana kerja perangkat daerah

lingkup koordinasi bidang perekonomian yang telah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah.

3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu untuk mengetahui perkembangan indikator pembangunan ekonomi makro yaitu PDRB dengan melakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah. Berikut adalah gambaran PDRB Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024, data tahun 2025 akan dirilis Maret 2026 sehingga belum tercantum dalam laporan ini.



Gambar 5. PDRB Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan peran aktif perangkat daerah. Hasil monitoring dan evaluasi ini juga digunakan sebagai alat bantu untuk dapat mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah.

Hasil monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk mengetahui atau mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan program kegiatan. Dengan dilakukannya identifikasi terhadap kendala – kendala tersebut maka akan dapat disusun rencana strategis dalam upaya mengatasi dan mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian diharapkan, target-target pembangunan yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah akan dapat tercapai secara optimal. Hasil dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu teridentifikasinya hasil pelaksanaan program kegiatan dan

- kendala yang dihadapi serta rekomendasi untuk percepatan pelaksanaan program kegiatan di masing-masing perangkat daerah
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian target-target pembangunan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pembangunan kepariwisataan sangat ditentukan dengan kolaborasi para pihak (PENTAHHELIX). Sub kegiatan ini memastikan dan mendorong kerjasama Pentahelix melalui fasilitasi pengembangan pariwisata di desa wisata.

Berikut adalah gambaran pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020-2024, data tahun 2025 akan dirilis Maret tahun 2026 sehingga belum bisa tercantum dalam laporan ini.



Gambar 6. Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020-2024

- 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Aktifitas utama dalam sub kegiatan ini adalah asistensi penyusunan dokumen perencanaan dengan hasil tersusunnya rencana kerja perangkat daerah bidang SDA, serta asistensi pengusulan program kegiatan pada Dinas Pertanian, Dinas ketahanan pangan, dan Dinas kelautan dan perikanan. Dokumen renja yang disusun juga dipastikan indikatornya spesifik, terukur, dapat dicapai dan agar kepastian waktu pencapaiannya.

Asistensi pengusulan DAK Fisik bidang pariwisata Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dilakukan dengan pendampingan agar OPD memenuhi kebutuhan Readiness Criteria, pendampingan dalam entri melalui aplikasi KRISNA.

- 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang SDA

Aktifitas utama dalam sub kegiatan ini adalah koordinasi, asistensi dan verifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan

dokumen perencanaan dengan hasil tersusunnya rencana kerja perangkat daerah bidang sumberdaya alam, serta asistensi pengusulan program kegiatan pada dinas bidang SDA.

Perangkat daerah diarahkan untuk dapat mempersiapkan dan menyusun dokumen persyaratan pengusulan (*readiness criteria*) dengan mengacu pada isu-isu strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas. Dengan demikian diharapkan dokumen perencanaan yang disusun akan dapat berkontribusi secara signifikan dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan tercapainya target-target pembangunan daerah di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan ketahanan pangan.

7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Pada sub kegiatan ini, aktifitas yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sektor pengelolaan sumberdaya alam, seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan peran aktif perangkat daerah. Dalam monitoring dan evaluasi ini juga di gunakan instrumen sebagai alat bantu untuk dapat mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah.

8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Fokus aktifitas dalam sub kegiatan ini yang pertama adalah asistensi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran (RKP) dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025. Hal ini dilakukan agar perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan DBHCHT sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI. Regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan DBHCHT di daerah diatur dalam PMK 206 Tahun 2020 dan terakhir diubah dengan PMK 215 Tahun 2021 tentang Pemanfaatann dan evaluasi penggunaan DBHCHT.

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sumber dana DBHCHT Tahun 2025, dalam sub kegiatan ini dilaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan secara periodik. Perangkat daerah pengampu DBHCHT tahun 2025 diwajibkan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala untuk setiap bulan, triwulan, semesteran dan Laporan akhir sesuai format laporan dalam PMK 215 Tahun 2021. Ketaatan pemenuhan kewajiban pelaporan secara berkala ini merupakan syarat salur dana transfer pusat DBHCHT. Sedangkan laporan akhir merupakan salah satu instrument pengukuran kinerja pemanfaatan DBHCHT tahun berjalan sebagai salah satu pertimbangan pagu DBHCHT Tahun berikutnya.

9) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD, PJMD dan RKPD)

Sub kegiatan ini dilakukan dalam rangka membantu mengkoordinasikan terlaksananya kegiatan Perangkat Daerah urusan Infrastruktur dan Kewilayahan diantaranya koordinasi dan konsolidasi data bidang perhubungan, bidang PUPR dan indikator infrastruktur wilayah.

Aktifitas yang dilakukan dengan pembahasan kegiatan perencanaan usulan PJU (Penerangan Jalan Umum) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu daerah super prioritas yang mendapatkan kesempatan sebagai penerima hibah Lampu Percontohan Alat Penerangan Jalan (APJ) dari Kementerian ESDM.

10) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dilakukan untuk membantu mensinergikan dokumen perencanaan pengusulan DAK Irigasi, Sanitasi serta Jalan dan Jembatan. Fokus aktifitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini yakni memastikan kesiapan data persyaratan (dokumen readiness criteria/RC) usulan DAK bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup.

Kegiatan asistensi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan dokumen-dokumen persyaratan (RC) yang diusulkan seperti DED, RAB, Detail Informasi Lokasi Usulan, serta dokumen-dokumen administrasi lainnya sudah tersedia. Sehingga diharapkan usulan-usulan yang diajukan memenuhi syarat dan bisa lanjut pada tahapan selanjutnya.

11) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini antara lain untuk mengetahui perkembangan bidang infrastruktur Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksanaan monitoring melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur. Ini mencakup pengumpulan data tentang tahapan-tahapan penyusunan, seperti pengumpulan data, analisis kebutuhan, identifikasi proyek, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Tujuan dari monitoring adalah untuk memastikan bahwa proses penyusunan berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan standar yang ditetapkan. Adapun evaluasi melibatkan penilaian terhadap kualitas dokumen perencanaan infrastruktur yang dihasilkan dan potensi dampaknya. Dengan demikian, melalui pelaksanaan Monev yang sistematis dan terintegrasi, diharapkan dokumen perencanaan infrastruktur yang dihasilkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.

Beberapa permasalahan yang kerap kali timbul dalam pelaksanaan monitoring penyusunan dokumen perencanaan antara lain berupa keterlambatan atau ketidaksempurnaan pelaporan dan masih rendahnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan penggunaan dana DAK seringkali kurang sehingga meskipun beberapa kelompok masyarakat telah berinisiatif mengambil peran dalam pemantauan, belum ada pola yang dianggap tepat dan efektif untuk menampung peran serta masyarakat tersebut. Tentunya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penggunaan dana DAK. Ini termasuk memperkuat mekanisme pelaporan dan pengawasan, meningkatkan kapasitas pengawasan di tingkat lokal, dan memperkuat peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana.

12) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah

Aktifitas kegiatan dalam sub kegiatan ini adalah dengan melaksanakan sinergi dan harmonisasi kegiatan Komite Irigasi. Komite irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota. Bentuk aktifitas yang dilakukan dengan penguatan kelembagaan dan memastikan partisipasi peningkatan SDM.

Penguatan kelembagaan Komite Irigasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan kinerjanya dalam mengelola sumber daya air irigasi. Hal ini dilakukan dengan cara :

- a. Membuat atau memperbarui peraturan dan pedoman yang jelas untuk operasi dan tata kelola Komite Irigasi.
- b. Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada anggota Komite Irigasi dalam berbagai aspek manajemen air irigasi, termasuk perencanaan pengelolaan air, teknis operasional infrastruktur irigasi, manajemen keuangan, dan keterampilan komunikasi dan negosiasi.
- c. Mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan dan pengambilan keputusan Komite Irigasi.
- d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan Komite Irigasi.
- e. Membangun kemitraan dan jaringan dengan lembaga pemerintah, swasta, dan non-pemerintah lainnya yang terkait dengan manajemen sumber daya air.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja Komite Irigasi dan implementasi kebijakan dan program-programnya.

Selain penguatan Komite Irigasi, BAPPERIDA juga melaksanakan SIMONI Inpres Air Minum dan Sanitasi. SIMONI Inpres Air Minum dan Sanitasi bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi usulan inpres air minum dan sanitasi. Inpres air dan sanitasi digalakkan untuk mencapai target SDGs. Instruksi Presiden (Inpres) Percepatan Penyediaan Air Minum

Perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum jaringan perpipaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, memastikan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ada bermanfaat bagi masyarakat dan dikelola dengan baik, serta pemanfaatan idle capacity melalui pembangunan Sambungan Rumah (SR), dan memprioritaskan sasaran pada Kabupaten/Kota yang memiliki akses air minum rendah, memiliki idle capacity, kapasitas fiskal rendah.

Kegiatan sinkronisasi bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan atau tindakan berjalan sejalan dalam waktu yang bersamaan, sementara harmonisasi bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan kesatuan antara berbagai elemen atau komponen yang terlibat dalam pembangunan. Keduanya penting dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.

13) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Aktifitas kegiatan dalam sub kegiatan ini adalah dengan melaksanakan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan, khususnya untuk urusan kawasan permukiman dan kawasan kumuh. Koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan ini untuk mendukung adanya keselarasan dan sinergisitas antar dokumen, yaitu dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026, serta mendukung indikator capaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026.

Bentuk aktifitas yang dilaksanakan dalam sub kegiatan ini adalah rapat koordinasi dan konsolidasi data-data infrastruktur kewilayahan. Data kewilayahan memiliki urgensi yang sangat besar dalam perencanaan pembangunan daerah karena beberapa alasan utama:

- a) Dasar Pengambilan Keputusan: Data kewilayahan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam perencanaan pembangunan daerah. Ini termasuk informasi tentang kebutuhan permukiman, kondisi eksisting,

serta tren dan pola perkembangan yang mungkin mempengaruhi pembangunan di masa depan.

- b) Efisiensi Sumber Daya: Dengan data kewilayahan yang baik, sumber daya dapat dialokasikan secara efisien untuk memprioritaskan proyek-proyek pembangunan yang paling penting dan mendesak. Ini membantu menghindari pemborosan sumber daya dan memaksimalkan dampak pembangunan.
- c) Perencanaan Jangka Panjang: Data kewilayahan memungkinkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan jangka panjang. Dengan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan kondisi infrastruktur, daerah dapat merencanakan investasi jangka panjang yang sesuai dengan perkembangan masa depan.
- d) Penyediaan Layanan Publik: Wilayah yang baik adalah jika ruang tersebut mampu memenuhi penyediaan pusat layanan dengan tingkat konektivitas yang tinggi. Data kewilayahan ini membantu dalam memahami di mana layanan-layanan ini diperlukan dan bagaimana mereka dapat dikelola dengan efisien.
- e) Daya Saing Ekonomi: Data kewilayahan yang memadai mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Data kewilayahan membantu dalam mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan ruang wilayah yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu.
- f) Kesiapsiagaan Bencana: Data kewilayahan ini juga penting untuk perencanaan kesiapsiagaan bencana. Dengan pemahaman yang baik tentang aspek kewilayahan yang ada, daerah dapat merencanakan respons yang efektif dalam menghadapi bencana alam atau keadaan darurat lainnya.

Dengan demikian, data kewilayahan tidak hanya penting untuk perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga merupakan aspek yang krusial dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Permasalahan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan di kabupaten Lombok Tengah bisa menjadi tantangan serius yang mempengaruhi efektivitas perencanaan dan implementasi proyek infrastruktur. Dengan demikian, diharapkan dengan pelaksanaan sub kegiatan ini, banyak hal yang bisa diurai. Diantaranya

kurangnya koordinasi antar kegiatan, keterbatasan sumber daya dan kapasitas yang tersedia, serta ketidaksesuaian regulasi dan kebijakan.

14) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Dalam rangka mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang kewilayahan, dilakukan kegiatan asistensi terhadap penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Lombok Tengah yang memuat rencana dan program kegiatan tahun 2023-2027 yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan urusan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan).

Asistensi penyusunan dokumen SSK Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi terkait ketersediaan data-data yang akan menunjang penyusunan dokumen SSK Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, dilakukan asistensi dengan OPD urusan sanitasi untuk memastikan kebenaran data eksisting yang akan digunakan dalam dokumen SSK Kabupaten Lombok Tengah.

15) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Pada sub kegiatan ini, aktifitas yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sektor pengelolaan infrastruktur ke wilayahan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan peran aktif perangkat daerah. Dalam monitoring dan evaluasi ini juga di gunakan instrumen sebagai alat bantu untuk dapat mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah.

Disamping untuk mengetahui hasil pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah, monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk mengetahui atau mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan program kegiatan. Dengan dilakukannya identifikasi terhadap kendala – kendala tersebut maka akan dapat disusun rencana strategis dalam upaya mengatasi dan mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Dengan

demikian diharapkan, indikator target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Rencana Kerja perangkat daerah akan dapat tercapai. Hasil/outcome dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu teridentifikasinya keselarasan dan capaian hasil pelaksanaan program kegiatan berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RKPD, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk percepatan pelaksanaan program kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi selanjutnya akan menjadi salah satu rekomendasi atau dasar dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah strategis dalam percepatan pelaksanaan program kegiatan.

16) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Pada kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, aktifitas yang dilaksanakan fokus pada penajaman kesiapan dokumen perencanaan usulan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Sanitasi, serta rencana pengusulan kegiatan PISEW untuk tahun anggaran 2026.

Aktifitas yang dilakukan antara lain meliputi rapat koordinasi dengan OPD teknis terkait untuk memastikan keselarasan dan kelengkapan data usulan (Readiness Criteria) yang dipersyaratkan pada saat pengajua usulan DAK.

Selain itu, aktifitas lainnya yang dilakukan yakni perencanaan usulan kegiatan PISEW untuk tahun anggaran 2026 yang dilakukan melalui aplikasi SIPPa Kementerian PUPR.

17) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Aktifitas yang dilaksanakan yaitu rapat koordinasi perencanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang pemerintahan. Pada aktifitas ini dilakukan rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mengidentifikasi capaian standar pelayanan minimal bidang pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan keamanan dan ketertiban umum dan penanganan kebencanaan. Aktifitas ini bertujuan untuk melakukan identifikasi

terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dan merumuskan rencana tindak lanjut dalam rangka optimalisasi pencapaian target standar pelayanan minimal bidang pemerintahan. Pada tahun 2025 capaian standar pelayanan minimal bidang pemerintahan mencapai 100%.

18) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Aktifitas yang dilaksanakan yaitu rapat asistensi penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang pemerintahan. Pada tahun 2024, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia melakukan asistensi terkait penyusunan rencana kerja bagi perangkat daerah di bawah koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Asistensi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan adanya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program kegiatan yang disusun perangkat daerah di dalam rencana kerja dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain, seperti rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah. Dalam hal ini dilakukan diskusi dengan perangkat daerah terkait mengenai indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dan strategi untuk mencapainya. Hal ini untuk memastikan bahwa perangkat daerah memiliki pemahaman yang komprehensif terkait indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan perangkat daerah dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk dapat mencapai atau merealisasikan target-target yang telah ditetapkan tersebut. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui output dari sub kegiatan ini yaitu pencapaian target RPJMD dari perangkat daerah yang berada di bawah koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Aktifitas lain yang dilakukan di sub kegiatan ini yaitu rapat asistensi perencanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pemerintahan. Di aktifitas ini Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia melakukan asistensi kepada perangkat daerah terkait untuk melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di urusan pemerintahan. Asistensi dilakukan dalam bentuk koordinasi dan diskusi untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi terkait pencapaian standar pelayanan

minimal dan menyusun rencana atau langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pencapaian standar pelayanan minimal di sektor pemerintahan. Pada tahun 2025, pencapaian standar pelayanan minimal di urusan pemerintahan mencapai 100%, tapi tentunya penguatan dukungan kebijakan dan anggaran, serta perumusan rancangan program kegiatan yang strategis tetap menjadi hal yang perlu ditingkatkan agar pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pemerintahan dapat tercapai secara optimal.

19) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan

Aktifitas yang dilakukan yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan dan monitoring dan evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal bidang pemerintahan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melaksanakan diskusi dengan perangkat daerah terkait dan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam melakukan perbaikan terhadap mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah. Hal ini diharapkan akan dapat berdampak pada meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

20) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan

Aktifitas yang dilaksanakan berupa rapat koordinasi sinergitas dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Aktifitas ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi perencanaan program kegiatan antara pemerintah desa dengan perangkat daerah terkait. Di dalam aktifitas ini dilakukan diskusi mengenai target-target pembangunan yang akan dicapai oleh desa dan juga perangkat daerah terkait, untuk selanjutnya dilakukan kolaborasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan antara pemerintah desa dengan perangkat daerah terkait, dalam berbagai aspek atau sektor pembangunan seperti di sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat,

penanganan persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, perlindungan Perempuan dan anak serta pemberdayaan Perempuan, pembinaan kepemudaan dan olahraga, pengembangan perpustakaan serta isu-isu yang berkaitan dengan urusan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia lainnya. Dengan demikian diharapkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan antara pemerintah desa dan perangkat daerah terkait akan dapat meningkat.

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia di sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, juga melakukan aktifitas sosialisasi mengenai perencanaan yang baik dari perspektif hukum, Aktifitas ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah yang menangani persoalan perencanaan terkait aspek-aspek hukum dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Dengan dipahaminya kaidah-kaidah hukum oleh aparatu perencana, diharapkan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, para perencana di perangkat daerah dapat merujuk pada regulasi yang ada dan dapat mengikuti atau mematuhi prosedur atau mekanisme perencanaan sesuai dengan hukum atau regulasi yang ada.

21) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub kegiatan ini melaksanakan aktifitas yang fokus pada upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Stunting menjadi salah satu isu nasional dalam bidang kesehatan, oleh karena itu maka bidang pemerintahan dan pembangunan manusia fokus pada upaya pencegahan dan penurunan stunting. Upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan melalui sejumlah kegiatan seperti promosi dan sosialisasi mengenai pencegahan dan penurunan stunting, sosialisasi mengenai pendewasaan usia perkawinan, sosialisasi mengenai pemberian makanan tambahan dan pola asuh, promosi terkait kesehatan ibu dan anak, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, koordinasi terkait peningkatan kualitas sanitasi dan

sejumlah aktifitas lainnya yang bertujuan untuk mencapai target penurunan stunting. Pada sub kegiatan ini dilakukan upaya penguatan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) baik yang berada di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. Penguatan TPPS ini perlu dilakukan, mengingat TPPS merupakan lembaga yang berperan dalam menggerakkan semua lembaga yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Tengah. Pada sub kegiatan ini upaya-upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting juga terus dilakukan dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait lainnya. Hal ini dimaksudkan agar upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting baik melalui intervensi sensitif maupun spesifik dapat dilakukan secara lebih optimal.

Aktifitas lainnya yang dilaksanakan di sub kegiatan ini yaitu koordinasi terkait perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Sebagaimana diketahui bahwa bidang pemerintahan dan pembangunan manusia fokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu maka salah satu sektor strategis yang menjadi fokus dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Berbicara mengenai kedua sektor tersebut maka tentu saja terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu berkaitan mengenai akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan tentu saja tidak akan terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan terus dilakukan secara optimal, melalui berbagai sumber pendanaan, salah satunya adalah yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana DAK Fisik dan DAK Non Fisik, maka bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terus secara intensif melakukan koordinasi dengan

perangkat daerah terkait dalam hal penyediaan data mengenai kondisi sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, kondisi ketersediaan sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan, serta mendampingi perangkat daerah terkait dalam melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan yang akan diajukan melalui DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dengan demikian diharapkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta sumber daya nya akan dapat dilakukan secara lebih optimal, sehingga layanan pendidikan dan kesehatan dapat berdampak secara lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Tengah.

Aktifitas selanjutnya yang dilaksanakan di sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yaitu rapat koordinasi terkait penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Dalam hal ini bidang pemerintahan dan pembangunan manusia melakukan koordinasi dan diskusi dengan perangkat daerah terkait mengenai rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan. Penentuan terhadap langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan pencapaian target dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan serta pembahasan mengenai kebutuhan anggaran menjadi hal yang dibahas dengan perangkat daerah. Dengan dilakukannya hal ini diharapkan rencana kerja yang disusun perangkat daerah akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) juga menjadi salah satu aktifitas yang dilakukan di sub kegiatan ini. Dalam kaitannya dengan hal ini, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, fokus pada pencapaian indikator indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks kesehatan (usia harapan hidup). Dalam kaitannya dengan hal ini, maka dilakukan identifikasi terhadap program kegiatan yang akan dapat berdampak secara signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Dukungan kebijakan dan anggaran juga terus dilakukan secara optimal dalam rangka mendukung tercapainya indeks pembangunan manusia di sektor kesehatan dan pendidikan. Penguatan pendataan juga menjadi hal yang terus

dilakukan. Pendataan ini dimaksudkan sebagai salah satu referensi atau pedoman dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan lokus intervensi dalam upaya meningkatkan indeks kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil pencapaian indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Disamping itu aktifitas yang dilaksanakan di sub kegiatan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yaitu pada optimalisasi koordinasi dalam rangka pencapaian target kinerja perangkat daerah yang telah tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia secara intensif melakukan koordinasi dengan perangkat daerah untuk memastikan tercapainya target-target pembangunan yang telah tertuang di dalam dokumen RPJMD tahun 2025. Dan berikut adalah data capaian RPJMD Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

22) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Aktifitas difokuskan pada pelaksanaan asistensi penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan asistensi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik bidang pembangunan manusia. Asistensi difokuskan pada langkah-langkah strategis agar perangkat daerah dapat mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan, baik didalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis maupun rencana kerja pemerintah daerah. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia juga secara intensif melakukan pembinaan, agar program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

23) Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Aktifitas difokuskan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang fokus pada optimalisasi pelaksanaan DAK Fisik dan

Non Fisik, pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah, percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal dan penurunan angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi dan stunting. Dalam hal ini bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, disamping melakukan koordinasi dan diskusi dengan perangkat daerah, juga melakukan kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan, seperti misalnya lokasi pembangunan pusat layanan pendidikan seperti rehab bangunan sekolah pada semua tingkat satuan pendidikan, pembangunan ruang laboratorium sekolah, pembangunan ruang kepala sekolah dan pembangunan maupun rehabilitasi serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Monitoring ke lokasi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti pembangunan dan rehab polindes, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dan lain-lain. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan dengan meninjau sejumlah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan perangkat daerah seperti pelatihan tenaga kerja, pelayanan dan pengembangan perpustakaan desa dan masjid serta sejumlah kegiatan lainnya. Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan serta pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

24) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Aktifitas yang dilaksanakan fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas layanan perpustakaan, peningkatan produktifitas tenaga kerja. pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak serta pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan anak. Aktifitas yang dilakukan antara lain meliputi rapat koordinasi secara intensif dengan melibatkan partisipasi aktif perangkat daerah dan stakeholder terkait lainnya, updating data dan informasi mengenai perkembangan capaian pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah berakitan dengan isu-isu tersebut serta fasilitasi kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan

pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang berkaitan dengan bidang pembangunan manusia. Di sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia, juga dilakukan fasilitas bagi organisasi Pita Putih Indonesia Kabupaten Lombok Tengah, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

- a) Masih belum optimalnya updating data terkait hasil capaian pelaksanaan program kegiatan;
- b) Koordinasi dengan perangkat daerah terkait belum berjalan secara optimal;
- c) Belum optimalnya implementasi kegiatan inovatif dalam upaya percepatan pencapaian target kegiatan;

Rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan yaitu:

- a) Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka memperoleh data dan informasi terkait hasil pelaksanaan program kegiatan serta melakukan identifikasi terhadap kendala yang dihadapi sebagai salah satu dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk percepatan pencapaian target program kegiatan;
- b) Melakukan rapat koordinasi secara rutin dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait lainnya dalam rangka meningkatkan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan;

Mengidentifikasi dan mengoptimalkan implementasi gagasan-gagasan inovatif dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan, dengan melibatkan partisipasi aktif semua pihak.

C. ROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penjabaran outcome dari program ini yaitu:

- a. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
- b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah

Tercapaiannya outcome ini ditunjukkan dengan dengan banyaknya jumlah Inovasi Daerah yang muncul pada Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025. Penjaringan inovasi dan pelaksanaan LIGA SINOVA Kabupaten Lombok Tengah meningkatkan jumlah inovasi yang muncul pada tahun berjalan.

Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif dilaksanakan dalam rangka penumbuhkembangan penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah dalam rangka pencapaian nilai Indeks Inovasi Daerah. Dengan indikator jumlah Laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan. Penyelenggaraan Lombok Tengah Innovative Government Award-Sistem Inovasi Daerah (LIGA SINOVA) sebagai ajang lomba inovasi di tingkat kabupaten Lombok Tengah yang diikuti oleh Perangkat Daerah atau masyarakat. BAPPERIDA melakukan pendampingan melalui pengoperasian layanan konsultasi dan asistensi dengan layanan KLINIK SINOVA. Selanjutnya untuk mendisiminasikan/mensosialisasikan hasil-hasil inovasi, BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan Mandalika Expo yang diikuti oleh Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa, Instansi Vertikal dan UMKM.

Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan asistensi dan monitoring yang lebih intensif. Selain itu, upaya perbaikan dapat dilakukan dengan membangun ekosistem inovasi melalui penerapan regulasi yang mendukung. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil mencakup penjaringan inovasi secara efektif, melakukan sosialisasi yang lebih intensif, serta menyusun regulasi yang mendukung pengembangan dan implementasi inovasi di daerah. Penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor kunci, di mana pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat meningkatkan

kontribusi individu terhadap inovasi. Pentingnya optimalisasi Klinik SINOVA juga tidak boleh diabaikan, karena hal ini dapat menjadi pusat pengembangan dan pertukaran ide yang mempercepat pertumbuhan inovasi. Dengan memadukan semua langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan inovasi di daerah.

Berikut disampaikan data penelitian dan pengembangan serta inovasi sampai dengan tahun 2025.

Tabel 15. Data penelitian dan pengembangan serta inovasi sampai dengan tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Kajian/Riset	19
2.	Inovasi	62

D. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Outcome kinerja dari program ini yaitu Nilai SAKIP OPD. Berdasarkan surat yang disampaikan Nomor 700.1.2.1/35/INSP/2025/RHS/Eva tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, capaian kinerja pada tahun 2025 melebihi target kinerja yaitu BB Predikat dengan nilai 75,60.

Keberhasilan mempertahankan angka 100% selama dua tahun berturut-turut menunjukkan bahwa sistem kerja asistensi dan koordinasi yang dijalankan BAPPERIDA telah memiliki pola yang mapan. Capaian ini didorong oleh proses sinkronisasi dan harmonisasi yang ketat melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang. BAPPERIDA berperan untuk memastikan tidak ada program OPD yang melenceng dari visi-misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD. Penggunaan aplikasi sim-bapperida (e-dalren) terbukti menjadi faktor pendorong dalam membantu proses evaluasi ini, meskipun masih terdapat kendala interpretasi data dari beberapa OPD.

III.4. Akuntabilitas Keuangan

Tabel 16. Realisasi Anggaran BAPPERIDA Tahun Anggaran 2025

URAIAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	(Rp)	(%)
URUSAN PERENCANAAN	11,553,873,905.35	11,187,771,517.25	96.83
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,709,905,656.36	7,473,309,952.25	96.93
Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	242,302,047.00	241,989,540.00	99.87
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69,329,342.00	69,091,640.00	99.66
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23,904,794.00	23,900,800.00	99.98
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30,466,784.00	30,463,000.00	99.99
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28,760,800.00	28,760,800.00	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	16,226,500.00	16,220,500.00	99.96
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37,957,196.00	37,927,600.00	99.92
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,384,592.00	23,382,700.00	99.99
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,272,039.00	12,242,500.00	99.76
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,417,778,562.36	6,213,749,101.25	96.82
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,314,503,322.36	6,110,479,861.25	96.77
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,497,900.00	12,497,900.00	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90,777,340.00	90,771,340.00	99.99
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17,574,000.00	17,574,000.00	100.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12,024,000.00	12,024,000.00	100.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,550,000.00	5,550,000.00	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,038,070.00	35,010,500.00	99.92
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18,560,460.00	18,537,000.00	99.87
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16,477,610.00	16,473,500.00	99.98
Administrasi Umum Perangkat Daerah	274,460,662.00	274,324,429.00	99.95
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,170,914.00	20,146,500.00	99.88
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51,500,748.00	51,477,300.00	99.95
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198,488,000.00	198,399,629.00	99.96

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,301,000.00	4,301,000.00	100.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545,090,275.00	531,267,300.00	97.46
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Mebel	69,027,150.00	68,275,000.00	98.91
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	256,901,610.00	255,766,300.00	99.56
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	219,161,515.00	207,226,000.00	94.55
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177,662,040.00	159,395,082.00	89.72
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177,662,040.00	159,395,082.00	89.72
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,290,736,993.00	1,279,971,613.00	99.17
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	966,301,093.00	963,643,128.00	99.72
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	288,989,822.00	287,369,803.00	99.44
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	29,126,733.00	29,109,400.00	99.94
Pelaksanaan Konsultasi Publik	46,813,352.00	46,626,000.00	99.60
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	44,141,022.00	44,131,100.00	99.98
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	202,106,965.00	201,595,000.00	99.75
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	38,903,000.00	38,903,000.00	100.00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	316,220,199.00	315,908,825.00	99.90
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	111,706,020.00	111,645,300.00	99.95
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	107,379,600.00	107,320,000.00	99.94
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	4,326,420.00	4,325,300.00	99.97
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	178,388,690.00	170,342,685.00	95.49
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	31,868,130.00	31,862,900.00	99.98
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	146,520,560.00	138,479,785.00	94.51
Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	34,341,190.00	34,340,500.00	100.00
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	6,239,730.00	6,239,500.00	100.00

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	8,251,730.00	8,251,500.00	100.00
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	19,849,730.00	19,849,500.00	100.00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2,553,231,255.99	2,434,489,952.00	95.35
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	967,015,280.00	933,632,867.00	96.55
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39,887,760.00	39,773,407.00	99.71
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	18,204,120.00	18,193,100.00	99.94
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24,178,000.00	24,156,700.00	99.91
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	68,717,320.00	68,664,760.00	99.92
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	194,232,000.00	164,221,400.00	84.55
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	29,069,200.00	29,060,600.00	99.97
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	38,046,220.00	38,004,000.00	99.89
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	554,680,660.00	551,558,900.00	99.44
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	895,284,815.99	831,541,825.00	92.88
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	85,915,677.00	85,233,410.00	99.21
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	28,492,818.00	25,491,600.00	89.47
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9,440,984.00	9,194,200.00	97.39
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	335,948,094.00	319,097,500.00	94.98
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	27,967,346.00	27,781,215.00	99.33
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	13,470,706.00	12,870,300.00	95.54

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14,049,006.00	14,043,400.00	99.96
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	380,000,184.99	337,830,200.00	88.90
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	690,931,160.00	669,315,260.00	96.87
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60,146,450.00	59,978,660.00	99.72
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	26,191,970.00	25,278,400.00	96.51
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	27,436,925.00	27,426,800.00	99.96
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	27,927,285.00	27,324,800.00	97.84
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20,329,695.00	20,251,600.00	99.62
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	324,472,815.00	317,042,900.00	97.71
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	17,581,825.00	17,577,900.00	99.98
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	186,844,195.00	174,434,200.00	93.36
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,232,445,521.00	1,216,665,730.00	98.72
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,232,445,521.00	1,216,665,730.00	98.72
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	658,744,746.00	643,396,790.00	97.67
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	658,744,746.00	643,396,790.00	97.67
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	573,700,775.00	573,268,940.00	99.92
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	573,700,775.00	573,268,940.00	99.92
TOTAL KESELURUHAN	12,786,319,426.35	12,404,437,247.25	97.01

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian serapan anggaran BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam kategori “**sangat tinggi**” yaitu sebesar **97,01%**.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama satu tahun anggaran. Penyusunan laporan ini berlandaskan pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound*).

Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penelitian, inovasi, dan pengelolaan aset daerah di masa mendatang. Hasil evaluasi yang tertuang dalam dokumen ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan, penyusunan rencana strategis, serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi sarana refleksi, pembelajaran, dan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASIDAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target Kinerja						Sumber Data	Penanggung Jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase ketercapaian IKU Kabupaten > 90%	Menghitung jumlah IKU (seluruh Perangkat Daerah) yang tercapai dibandingkan dengan jumlah total IKU (seluruh Perangkat Daerah)	Persen	Jumlah IKU Kabupaten dengan capaian kinerja > 90% dibagi jumlah total IKU Kabupaten dikali seratus			100	100	100	100	OPD, BPS	Kepala Bapperida
		Persentase perencanaan OPD baik	Menghitung jumlah AKIP (seluruh Perangkat Daerah) yang tercapai dibandingkan dengan jumlah total AKIP (seluruh Perangkat Daerah)	Persen	Jumlah OPD dengan nilai perencanaan dalam AKIP baik dibagi dengan jumlah seluruh OPD dikali seratus Ket : Baik = nilai perencanaan > 60			90	95	100	100	Inspektorat	Kepala Bapperida
		Indeks Inovasi Daerah	Pengukuran Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri.	Predikat	Hasil penilaian Kemendagri Ket : kurang inovatif = IID : 0-34,99; inovatif = IID : 35-60; sangat inovatif = IID : 60,01-100			Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Kemendagri	Kepala Bapperida
2	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PROGRAM PRIORITAS DAERAH	Persentase OPD dengan rata-rata capaian kinerja tinggi	Menghitung jumlah Indikator Program (seluruh Perangkat Daerah) yang tercapai dibandingkan dengan jumlah total Indikator Program (seluruh Perangkat Daerah)	Persen	Jumlah OPD dengan rata-rata capaian kinerja tinggi dibagi jumlah seluruh OPD dikali seratus Ket : Tinggi = > 76%			100	100	100	100	Bapperida	Kepala Bapperida
3	MENINGKATNYA KESELARASAN DAN SINERGI PERENCANAAN DAERAH	Persentase keselarasan Renstra dengan RPJMD	Konsistensi nomenklatur program dan kegiatan pada dokumen Renstra dengan nomenklatur program pada dokumen RPJMD	Persen	Jumlah program pada Renstra OPD dibagi jumlah program RPJMD dikali seratus			100	100	100	100	Bapperida	Kepala Bapperida
		Persentase keselarasan Renja dengan RKPD	Konsistensi nomenklatur program pada dokumen RKPD dengan nomenklatur program pada dokumen Renja yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Persen	Jumlah program dan kegiatan dalam Renja OPD yang sesuai dengan program dan kegiatan dalam RKPD dibagi jumlah seluruh program dan kegiatan dalam RKPD dikali seratus			100	100	100	100	Bapperida	Kepala Bapperida
4	TERWUJUDNYA RISET DAN INOVASI DAERAH YANG BERKUALITAS	Persentase inovasi daerah yang dimanfaatkan dan/atau yang direplikasi	Meniru atau menduplikasi inovasi yang sudah terbukti berhasil di suatu daerah atau instansi	Persen	Jumlah inovasi daerah yang dimanfaatkan dan/atau direplikasi dibagi jumlah inovasi daerah yang dihasilkan/dilaporkan dikali seratus			100	100	100	100	Bapperida	Kepala Bapperida
5	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN URUSAN	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal	Predikat	Hasil penilaian Kemendagri Ket: Sangat Kurang (0-30), Kurang (30-50), Cukup (50-60), Baik (60-70), Sangat Baik (70-80), Memuaskan (80-90), Sangat Memuaskan (90-100)			B	B	B	B	Bapperida	Kepala Bapperida

Praya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2026-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET TAHUN						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	Indeks Perencanaan Pembangunan daerah merupakan merupakan penilaian terhadap kualitas dokumen perencanaan daerah berdasarkan keselarasan, konsistensi, dan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah (Skor komponen} \times \text{bobot komponen)}}{\text{Jumlah bobot}} \times 100 \%$	91,50	92,01	92,50	93,01	95.45	97.17	
2	Persentase Kebiasaan Berbasis Bukti	Persen	Kebijakan berbasis bukti adalah prioritas pembangunan daerah dalam Dokumen RKPD yang ditetapkan berdasarkan hasil riset	$\frac{\text{Jumlah prioritas daerah yang berdasarkan hasil riset}}{\text{Jumlah semua prioritas daerah yang ditetapkan}} \times 100 \%$	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kesesuaian Isu Strategis Dengan Prioritas Daerah	Persen	Kesesuaian isu strategis dengan prioritas daerah adalah tingkat kesesuaian antara isu strategis yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen resmi daerah	$\frac{\text{Jumlah isu strategis SKPD yang sesuai dengan prioritas daerah}}{\text{Jumlah total isu strategis SKPD}} \times 100 \%$	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Ketercapaian IKU Kabupaten	Persen	Menghitung jumlah IKU (seluruh Perangkat Daerah) yang tercapai dibandingkan dengan jumlah total IKU (seluruh Perangkat Daerah)	$\frac{\text{Jumlah IKU Kabupaten dengan capaian kinerja}}{\text{Jumlah total IKU Kabupaten}} \times 100 \%$	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Pengukuran Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri.	Nilai diperoleh dari hasil penilaian Kemendagri	61.56	63.11	64.66	66.21	67.76	68.32	
6	Persentase Hasil Riset Yang Diimplementasikan	Persen	Persentase Hasil Riset Yang Diimplementasi merupakan jumlah hasil riset/penelitian yang telah dimanfaatkan atau diterapkan dalam bentuk kebijakan, program, produk, layanan, atau inovasi di lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat	$\frac{\text{Jumlah hasil riset yang diimplementasikan}}{\text{Jumlah total hasil riset yang dihasilkan}} \times 100 \%$	100	100	100	100	100	100	
7	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	Nilai SAKIP merupakan penilai dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal terhadap implementasi SAKIP	Nilai diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal	75.60	77.66	79.73	81.79	83.86	85.92	

Praya, 7 November 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

H. LATU WIRANATA, S.P., M.A.
Pembina (K.1 IV/b)
NIP. 197611282005011006

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tahun Pelaksanaan 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPd:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluas 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (2026) (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
										1		2		3		4													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)				
Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program Prioritas Daerah																													
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	100 %	6,935,713,638		1,621,078,917	100 %	Rp.1,654,061,456	%	Rp.281,897,688	%	Rp.107,365,700	80 %	Rp.243,088,525	80 %	Rp.365,350,000	80 %	Rp.997,701,913	%			Rp. 60	%	0	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah			
			Persentase Kesesuaian Program pada Renstra dengan RPJMD	100 %				100 %		%		%	Rp.107,365,700	80 %	Rp.243,088,525	80 %		80 %		%				%					
		Penyusunan Perencanaan dan Pendaan	Persentase Hasil Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Program Prioritas	2 Dokumen	Rp.5,134,834,446		Rp.1,481,960,917	2 Dokumen	Rp.973,481,096	0 Dokumen	Rp.187,725,103	1 Dokumen	Rp.97,522,300	0 Dokumen	Rp.105,560,425	1 Dokumen	Rp.332,559,000	2 Dokumen	Rp.723,366,828	100 %	74 %	4	Rp.2,205,327,745	200	43%				
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Rp.935,302,830		Rp.99,097,000	3 Dokumen	Rp.129,706,020	0 Dokumen	Rp.0	0 Dokumen	Rp.2,765,000	3 Dokumen	Rp.113,084,400	0 Dokumen	Rp.207,400	4 Dokumen	Rp.116,056,800	133 %	89 %	7	Rp.215,153,800	233	23%				
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembnagunan Daerah	3 Dokumen	Rp.865,576,362		Rp.40,021,000	3 Dokumen	Rp.550,874,340	0 Dokumen	Rp.94,172,585	1 Dokumen	Rp.7,078,400	1 Dokumen	Rp.24,443,700	1 Dokumen	Rp.32,583,600	3 Dokumen	Rp.158,278,285	100 %	29 %	6	Rp.198,299,285	200					
Rata-rata Capaian kinerja (%)																				100%	60%								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Rendah								
Meningkatnya Keselarasan dan Sinergi Perencanaan Daerah																													
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dan SDA dengan RKPD	100 %	8,167,770,096		1,689,741,873	100 %	Rp.3,012,275,892	%	Rp.266,005,535	%	Rp.340,483,929	80 %	Rp.505,339,400	80 %	Rp.902,358,788	80 %	Rp.2,014,187,652	%			Rp. 67	%	0				
			Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	100 %				100 %		%		%	Rp.340,483,929	80 %	Rp.505,339,400	80 %		80 %		%				%					
			Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang P2M dengan RKPD	100 %				100 %		%		%	Rp.340,483,929	80 %	Rp.505,339,400	80 %		80 %		%				%					
			Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Ekonomi dan SDA	100 %				100 %		%		%	Rp.340,483,929	80 %	Rp.505,339,400	80 %		80 %		%				%					
			Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %				100 %		%		%	Rp.340,483,929	80 %	Rp.505,339,400	80 %		80 %		%				%					
			Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang P2M	100 %				100 %		%		%	Rp.340,483,929	80 %	Rp.505,339,400	80 %		80 %		%				%					

		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	Rp.2,722,590,032		Rp.640,781,056	8 Dokumen	Rp.1,212,345,410	3 Dokumen	Rp.117,602,800	1 Dokumen	Rp.123,703,867	2 Dokumen	Rp.160,236,500	2 Dokumen	Rp.382,903,600	7 Dokumen	Rp.784,446,767	88 %	65 %	15	Rp.1,425,227,823	188	52%				
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Perekonomian dan SDA	8 Dokumen			Rp.783,766,289	8 Dokumen	Rp.1,004,268,417	3 Dokumen	Rp.110,063,975	1 Dokumen	Rp.149,137,362	2 Dokumen	Rp.89,973,000	2 Dokumen	Rp.332,766,688	7 Dokumen	Rp.681,941,025	88 %	68 %	15	Rp.1,465,707,314	188	54%				
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen			Rp.265,194,528	8 Dokumen	Rp.795,662,065	1 Dokumen	Rp.38,338,760	3 Dokumen	Rp.67,642,700	2 Dokumen	Rp.255,129,900	2 Dokumen	Rp.186,688,500	7 Dokumen	Rp.547,799,860	88 %	69 %	15	Rp.812,994,388	188	30%				
Rata-rata Capaian kinerja (%)																				100%	67%								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sedang								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	29,583,124,094		666,260,510	B Predikat	Rp.7,525,912,560	Predikat	Rp.1,763,721,038	Predikat	Rp.2,028,228,708	BB Predikat	Rp.1,353,355,776	BB Predikat	Rp.1,790,856,143	BB Predikat	Rp.6,936,161,665	Predikat			Rp. 92	Predikat	0				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen	Rp.4,406,917,384		Rp.101,937,000	22 Dokumen	Rp.319,546,034	6 Dokumen	Rp.37,615,680	6 Dokumen	Rp.55,719,720	6 Dokumen	Rp.42,953,600	4 Dokumen	Rp.77,869,040	19 Dokumen	Rp.214,158,040	86 %	67 %	41	Rp.316,095,040	186	7%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31 Dokumen	Rp.22,899,956,286		Rp.102,504,100	31 Dokumen	Rp.6,024,246,038	4 Dokumen	Rp.1,632,322,386	6 Dokumen	Rp.1,810,613,996	10 Dokumen	Rp.854,690,582	11 Dokumen	Rp.1,467,018,042	21 Dokumen	Rp.5,764,645,006	68 %	96 %	52	Rp.5,867,149,106	168	26%				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Administrtasi BMD	2 Dokumen	Rp.14,000,000		Rp.2,023,000	2 Dokumen	Rp.20,574,000	1 Dokumen	Rp.4,567,000	0 Dokumen	Rp.1,725,000	1 Dokumen	Rp.2,542,500	0 Dokumen	Rp.4,931,500	3 Dokumen	Rp.13,766,000	150 %	67 %	5	Rp.15,789,000	250	113%				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen			Rp.6,139,600	2 Dokumen	Rp.47,038,070	1 Dokumen	Rp.5,984,000	0 Dokumen	Rp.7,277,100	0 Dokumen	Rp.6,410,400	1 Dokumen	Rp.8,304,700	2 Dokumen	Rp.27,976,200	100 %	59 %	4	Rp.34,115,800	200	244%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Dokumen	Rp.868,298,796		Rp.189,851,810	12 Dokumen	Rp.388,238,662	3 Dokumen	Rp.52,055,874	3 Dokumen	Rp.45,354,948	3 Dokumen	Rp.36,174,094	3 Dokumen	Rp.92,184,213	10 Dokumen	Rp.225,769,129	83 %	58 %	22	Rp.415,620,939	183	48%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang diadakan	3 jenis	Rp.1,194,451,628	2 jenis	Rp.263,805,000	3 jenis	Rp.583,607,716	0 jenis	Rp.0	1 jenis	Rp.50,800,000	2 jenis	Rp.277,955,600	0 jenis	Rp.118,167,700	4 jenis	Rp.446,923,300	133 %	77 %	6	Rp.710,728,300	200	60%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Kondisi Baik	2 jenis	Rp.185,500,000		Rp.0	2 jenis	Rp.142,662,040	1 jenis	Rp.31,176,098	0 jenis	Rp.56,737,944	1 jenis	Rp.132,629,000	0 jenis	Rp.22,380,948	3 jenis	Rp.242,923,990	150 %	170 %	5	Rp.242,923,990	250	0				
Rata-rata Capaian kinerja (%)																				100%	92%								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	Terwujudnya Inovasi Daerah yang Berkualitas																												
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %	177,251,020		478,495,931	100 %	Rp.1,368,206,257	%	Rp.77,004,420	%	Rp.87,808,100	80 %	Rp.287,096,200	80 %	Rp.597,531,110	80 %	Rp.1,049,439,830	%			Rp. 77	%	0				
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	24 %		23 %		24 %		%		%	Rp.87,808,100	20 %	Rp.287,096,200	20 %		20 %		%				%					
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Hasil Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan	2 Dokumen	Rp.127,251,020		Rp.478,495,931	2 Dokumen	Rp.657,253,876	0 Dokumen	Rp.28,039,580	1 Dokumen	Rp.0	0 Dokumen	Rp.203,793,700	1 Dokumen	Rp.382,456,410	2 Dokumen	Rp.614,289,690	100 %	93 %	4	Rp.1,092,785,621	200	859%				
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	Rp.50,000,000		Rp.0	1 Dokumen	Rp.710,952,381	0 Dokumen	Rp.48,964,840	0 Dokumen	Rp.87,808,100	0 Dokumen	Rp.83,302,500	1 Dokumen	Rp.215,074,700	1 Dokumen	Rp.435,150,140	100 %	61 %	2	Rp.435,150,140	200	0				
Rata-rata Capaian kinerja (%)																				100%	77%								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH KEGIATAN (%)																				100 %	81 %								
PREDIKAT KINERJA																				Sangat Tinggi	Tinggi								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :

Praya, Januari 2026
Kepala BAPPERIDA
Kabupaten Lombok Tengah

H. LAJU WIRANA TA, S.IP/MA
NIP. 9561282003011006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Program Prioritas Daerah	Persentase OPD Dengan Rata-Rata Capaian Kinerja Tinggi	100%
2.	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Renstra Dengan RPJMD	100%
		Persentase Keselarasan Renja Dengan RKPD	100%
3.	Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Persentase Inovasi Daerah Yang Dimanfaatkan dan/atau yang direplikasi	100%

PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp1.710.002.646,00	DAU
2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp3.012.275.891,99	DAU
3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp1.368.206.257,00	DAU
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp7.525.912.560,41	DAU

Praya, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. AHMAD SAMSURIADI, M.Si.**

Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. LALU WIRANATA, S.IP, MA**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

LALU WIRANATA, S.IP, MA

Pihak Pertama,

Drs. H. AHMAD SAMSURIADI, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Nilai SAKIP OPD	B Predikat

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp319.546.034,00	APBD (DAU)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.024.246.038,41	APBD (DAU)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp20.574.000,00	APBD (DAU)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp47.038.070,00	APBD (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp388.238.662,00	APBD (DAU)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp583.607.716,00	APBD (DAU)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp142.662.040,00	APBD (DAU)

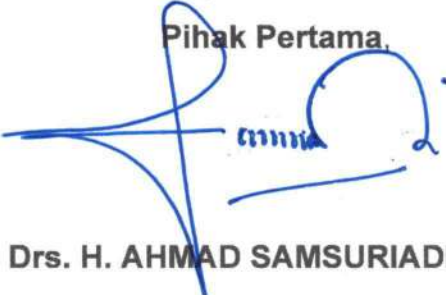
Praya, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



LALU WIRANATA, S.IP, MA

Pihak Pertama,



Drs. H. AHMAD SAMSURIADI, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JOHAN ZAMRONI BAROKAH, S.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.

Praya, 6 Januari 2025

Pihak Pertama,

JOHAN ZAMRONI BAROKAH, S.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Program Prioritas Daerah	Persentase Keselarasan Prioritas Daerah Dengan Sasaran RPJMD	100%
		Persentase keselarasan kinerja program prioritas OPD dengan prioritas daerah	100%
		Persentase OPD dengan Rata-rata Capaian Kinerja Tinggi	100%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp973.481.096,00	APBD (DAU)
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Rp129.706.020,00	APBD (DAU)
	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp550.874.340,00	APBD (DAU)
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp55.941.190,00	APBD (DAU)

Praya, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.

JOHAN ZAMRONI BAROKAH, S.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI MULIANA WIDIASTUTI, S.Sos., M.P.A.**
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.

Pihak Pertama,

SRI MULIANA WIDIASTUTI, S.Sos., M.P.A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Renstra Dengan RPJMD	100%
		Persentase Keselarasan Renja Dengan RKPD	100%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp1.212.345.410,00	APBD (DAU)

Praya, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.

Pihak Pertama,



SRI MULIANA WIDIASTUTI, S.Sos., M.P.A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DALILAH, S.P., M.Env.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian, Sda, Infrastruktur Dan Kewilayahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.

Praya, 6 Januari 2024

Pihak Pertama,

DALILAH, S.P., M.Env.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Renstra Dengan RPJMD	100%
		Persentase Keselarasan Renja Dengan RKPD	100%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp1.004.268.416,99	APBD (DAU)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp795.662.065,00	APBD (DAU, DBHCHT)

Pihak Kedua,



H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.

Praya, 6 Januari 2025

Pihak Pertama,



DALILAH, S.P., M.Env.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AJIE NASRULFIDDIN PUA NOTE,S.SOS.,MM.**
Jabatan : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.

Praya, 6 Januari 2025

Pihak Pertama,

AJIE NASRULFIDDIN PUA NOTE,S.SOS.,MM.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	24%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp657.253.876,00	APBD (DAU)
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp710.952.381,00	APBD (DAU)

Praya, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.

AJIE NASRULFIDDIN PUA NOTE,S.SOS.,MM.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP


H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Program Prioritas Daerah	Persentase OPD Dengan Rata-Rata Capaian Kinerja Tinggi	100%
2.	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Renstra Dengan RPJMD	100%
		Persentase Keselarasan Renja Dengan RKPD	100%
3.	Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Persentase Inovasi Daerah Yang Dimanfaatkan dan/atau yang direplikasi	100%

PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp1.290.736.993,00	APBD (DAU)
2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp2.553.231.255,99	APBD (DAU)
3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp1.232.445.521,00	APBD (DAU)
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp7.709.905.656,36	APBD (DAU)

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP


H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. AHMAD SAMSURIADI, M.Si.**

Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. LALU WIRANATA, S.IP, MA**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua,

LALU WIRANATA, S.IP, MA

Pihak Pertama,

Drs. H. AHMAD SAMSURIADI, M.Si.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Nilai SAKIP OPD	B Predikat

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp242.302.047,00	APBD (DAU)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.417.778.562,36	APBD (DAU)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp17.574.000,00	APBD (DAU)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp35.038.070,00	APBD (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp274.460.662,00	APBD (DAU)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp545.090.275,00	APBD (DAU)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp177.662.040,00	APBD (DAU)

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua,



LALU WIRANATA, S.IP, MA

Pihak Pertama,



Drs. H. AHMAD SAMSURIADI, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JOHAN ZAMRONI BAROKAH, S.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua,

H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.

Pihak Pertama,

JOHAN ZAMRONI BAROKAH, S.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Program Prioritas Daerah	Persentase Keselarasan Prioritas Daerah Dengan Sasaran RPJMD	100%
		Persentase keselarasan kinerja program prioritas OPD dengan prioritas daerah	100%
		Persentase OPD dengan Rata-rata Capaian Kinerja Tinggi	100%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp966.301.093,00	APBD (DAU)
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp111.706.020,00	APBD (DAU)
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp178.388.690,00	APBD (DAU)
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp34.341.190,00	APBD (DAU)

Pihak Kedua,



H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Pertama,



JOHAN ZAMRONI BAROKAH, S.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI MULIANA WIDIASTUTI, S.Sos., M.P.A.**
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua,

H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.

Pihak Pertama,

SRI MULIANA WIDIASTUTI, S.Sos., M.P.A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Renstra Dengan RPJMD	100%
		Persentase Keselarasan Renja Dengan RKPD	100%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp967.015.280,00	APBD (DAU)

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua,



H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.

Pihak Pertama,



SRI MULIANA WIDIASTUTI, S.Sos., M.P.A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DALILAH, S.P., M.Env.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian, Sda, Infrastruktur Dan Kewilayahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua,

H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.

Pihak Pertama,

DALILAH, S.P., M.Env.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Renstra Dengan RPJMD	100%
		Persentase Keselarasan Renja Dengan RKPD	100%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp895.284.815,99	APBD (DAU)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp690.931.160,00	APBD (DAU)

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.

DALILAH, S.P., M.Env.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.

H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	24%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp658.744.746,00	APBD (DAU)
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp573.700.775,00	APBD (DAU)

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.



H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (LKjIP-SKPD)
DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2026**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKjIP SKPD) di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKjIP SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Lombok Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tentang Pengundangan tanggal 14 Agustus 1958 Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (LKjIP-SKPD) DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026**

- KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKjIP SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKjIP SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKjIP SKPD) Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada Tanggal 2 Januari 2026
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah,



H. LALU WIRANATA, SIP.MA
Pembina Tingkat II/b
NIP. 197611282005011006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 6 Tahun 2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (LKJiP SKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinator
5	Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Koordinator
6	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator
7	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinator
8	Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
6	Prade Septo Nugroho, ST.	Anggota

Ditetapkan di Praya
Pada Tanggal 2 Januari 2026
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah,



H. LAELI WIRANATA, SIP.MA
Pembina Tingkat II/b
NIP. 197611282005011006



DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG SUDAH MELAKUKAN ASISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN

Berikut disampaikan daftar Perangkat Daerah yang sudah melakukan asisten penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2026-2030 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) tahun 2026:

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
11. Dinas Ketahanan Pangan
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
21. Dinas Kelautan dan Perikanan
22. Dinas Pariwisata
23. Dinas Pertanian
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25. Sekretaris Daerah
26. Sekretariat DPRD
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Riest dan Inovasi Daerah
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah
29. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
30. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
31. Inspektorat
32. Kecamatan Praya
33. Kecamatan Praya Tengah
34. Kecamatan Praya Barat

35. Kecamatan Praya Barat Daya
36. Kecamatan Praya Timur
37. Kecamatan Pujut
38. Kecamatan Janapria
39. Kecamatan Kopang
40. Kecamatan Batukliang
41. Kecamatan Batukliang Utara
42. Kecamatan Pringgarata
43. Kecamatan Jonggat
44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
45. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Praya, 2 Februari 2026
Kepala BAPPERIDA
Kabupaten Lombok Tengah



H. LATU WIRANATA, S.IP, MA
NIP. 197611282005011006



**REKAP EVALUASI DAN PENGENDALIAN PERENCANAAN
PADA APLIKASI E-DALREN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025**

Rekap berdasarkan capaian kinerja dan Keuangan

Predikat kinerja	Jumlah PD	%
Rendah	2	4,44
Sangat Tinggi	34	75,56
Sedang	1	2,22
Tinggi	8	17,78
Grand Total	45	100,00
Rata-Rata Kabupaten:		93,69

Predikat keuangan	Jumlah PD	%
Rendah	2	4,44
Sangat Rendah	1	2,22
Sangat Tinggi	33	73,33
Sedang	1	2,22
Tinggi	8	17,78
Grand Total	45	100,00
Realisasi Kabupaten:		95,55

Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No	PD	Pagu	Pagu Perubahan	Realisasi	% keuangan	Predikat keuangan	% kinerja	Predikat kinerja
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	971.795.399.096	995.808.684.574	989.510.573.652	99	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	316.909.302.298	338.627.480.298	332.973.087.225	98	Sangat Tinggi	95	Sangat Tinggi
3	Rumah Sakit Umum Daerah	160.331.424.786	162.454.668.508	110.488.639.664	68	Sedang	73	Sedang
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	186.904.165.257	186.936.382.084	196.204.942.534	105	Sangat Tinggi	86	Tinggi
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	55.113.286.651	59.888.011.553	59.202.268.015	99	Sangat Tinggi	63	Rendah
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.903.338.240	14.718.668.684	13.794.605.551	94	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.753.517.828	5.701.654.355	5.209.016.530	91	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
8	Dinas Sosial	8.209.171.038	7.876.498.544	7.352.614.747	93	Sangat Tinggi	82	Tinggi
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.409.603.451	11.140.615.832	10.880.536.584	98	Sangat Tinggi	81	Tinggi
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	16.426.942.401	16.020.333.976	8.941.672.342	56	Rendah	99	Sangat Tinggi
11	Dinas Ketahanan Pangan	4.762.330.615	6.202.357.528	6.062.158.781	98	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
12	Dinas Lingkungan Hidup	12.259.314.614	13.190.610.009	11.919.249.963	90	Sangat Tinggi	98	Sangat Tinggi
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.053.627.844	7.053.627.844	6.185.939.052	88	Tinggi	100	Sangat Tinggi
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.923.517.559	9.157.154.695	8.968.755.230	98	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
15	Dinas Perhubungan	19.954.664.927	22.474.914.167	21.023.837.004	94	Sangat Tinggi	95	Sangat Tinggi
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.498.898.161	8.941.691.787	8.048.466.286	90	Sangat Tinggi	97	Sangat Tinggi
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah	11.793.717.870	13.211.391.629	13.042.128.053	99	Sangat Tinggi	82	Tinggi
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.868.487.862	5.739.395.252	5.497.154.480	96	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	18.879.016.881	21.668.195.249	21.284.427.172	98	Sangat Tinggi	99	Sangat Tinggi
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	8.944.045.529	8.524.687.309	8.276.238.585	97	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.444.227.001	10.275.947.052	10.100.549.358	98	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
22	Dinas Pariwisata	14.305.711.571	14.305.711.571	7.588.500.170	53	Rendah	95	Sangat Tinggi
23	Dinas Pertanian	75.868.687.147	81.033.929.530	78.514.096.990	97	Sangat Tinggi	89	Tinggi
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.850.575.957	24.061.897.742	23.404.962.167	97	Sangat Tinggi	88	Tinggi
25	Sekretaris Daerah	38.499.495.300	38.752.623.808	37.421.349.034	97	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
26	Sekretariat DPRD	45.324.032.775	59.638.529.696	61.715.093.462	103	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
27	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	13.560.456.165	13.560.456.165	10.997.491.060	81	Tinggi	100	Sangat Tinggi
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	444.129.609.554	444.129.609.554	418.028.353.372	94	Sangat Tinggi	95	Sangat Tinggi
29	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	29.273.461.032	30.393.020.566	25.652.015.710	84	Tinggi	97	Sangat Tinggi
30	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	9.963.716.354	9.963.716.354	8.237.175.293	83	Tinggi	95	Sangat Tinggi
31	Inspektorat	20.072.822.753	20.772.903.343	20.065.659.964	97	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
32	Kecamatan Praya	22.961.502.581	22.961.502.581	18.169.210.745	79	Tinggi	97	Sangat Tinggi
33	Kecamatan Praya Tengah	7.578.952.666	8.123.168.235	8.456.757.709	104	Sangat Tinggi	96	Sangat Tinggi
34	Kecamatan Praya Barat	3.041.005.347	2.868.775.023	2.261.643.102	79	Tinggi	100	Sangat Tinggi
35	Kecamatan Praya Barat Daya	2.753.028.576	2.753.028.576	2.665.300.106	97	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
36	Kecamatan Praya Timur	2.853.721.227	2.596.691.270	3.502.007.864	135	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi

No	PD	Pagu	Pagu Perubahan	Realisasi	% keuangan	Predikat keuangan	% kinerja	Predikat kinerja
37	Kecamatan Pujut	3.599.050.016	3.609.799.504	3.439.020.697	95	Sangat Tinggi	99	Sangat Tinggi
38	Kecamatan Janapria	3.122.505.845	3.122.505.845	2.765.045.952	89	Tinggi	81	Tinggi
39	Kecamatan Kopang	3.445.909.778	2.451.263.348	2.047.607.224	0	Sangat Rendah	58	Rendah
40	Kecamatan Batukliang	2.210.260.509	2.281.313.429	2.199.583.332	96	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
41	Kecamatan Batukliang Utara	2.680.405.629	2.372.474.488	1.934.907.348	82	Tinggi	77	Tinggi
42	Kecamatan Pringgarata	3.057.603.331	3.057.603.331	3.006.366.987	98	Sangat Tinggi	98	Sangat Tinggi
43	Kecamatan Jonggat	2.833.632.579	2.833.632.579	2.731.262.816	96	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7.760.853.221	7.776.308.517	7.773.827.145	100	Sangat Tinggi	105	Sangat Tinggi
45	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.607.055.385	9.937.620.976	9.615.436.812	97	Sangat Tinggi	96	Sangat Tinggi
		2.658.492.055.207	2.738.971.056.960	2.617.159.535.869	95,55		93,69	

Praya, 2 Februari 2026
Kepala BAPPERIDA
Kabupaten Lombok Tengah



H. IAIN WIRANATA, S.IP, MA
NIP. 197611282005011006



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

RISET DAN INOVASI DAERAH

Jln. Raya Puguh Puyung – Praya Gendung C Lt. 3

email: bapperida@lomboktengahkab.go.id

RINCIAN DATA PRODUK INOVASI YANG DIHASILKAN OLEH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Keterangan
1	Pengawas/Dinas Pendidikan	Inovasi Bentuk Lainnya (Materi Pengajaran)	Non Digital	PAK BAR JADUL "PETA KONSEP-LEMBAR KERJA BEDAH MODUL"		Pendidikan	
2	SDN 1 Bakan	Inovasi Bentuk Lainnya (Materi Pengajaran)	Digital	APKOLIN G2 "APLIKASI KONTROL LITERASI DAN NUMERASI GENERASI 2"		Pendidikan	
3	Dinas Pertanian /UPT-HPT BATUKLIANG	Penanggulangan Kemiskinan	Non Digital	CARA BERTANI PROFESIONAL EFEKTIF DAN BERDAYA SAING (CABE PEDAS)		Pertanian	
4	Dinas Pertanian /UPT-HPT BATUKLIANG	Pelayanan Publik	Digital	PAPUK SUDI (PELAYANAN ADMINISTRASI PUPUK BERSUBSIDI)		Pertanian	
5	Dinas Kesehatan/ UPTD BLUD Puskesmas Aik Mual	Pelayanan Publik	Non Digital	RAGIL (RAPOR GIGI DAN MULUT)		Kesehatan	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Keterangan
6	Dinas Pendidikan/Pengawas	Inovasi Bentuk Lainnya (Materi Pengajaran)	Digital	KUTEBAR-SEGI EMPAT "KUIS TEBAK GAMBAR SEGI EMPAT"		Pendidikan	
7	SMPN Satap 5 Praya Barat	Inovasi Bentuk Lainnya (Materi Pengajaran)	Digital	SI LARVA "SITUS LABORATORIUM VIRTUAL IPA"		Pendidikan	
8	SDN NEGERI OROK GENDANG	Inovasi Bentuk Lainnya (Materi Pengajaran)	Non Digital	KAMUS KARDUS "KETEMU KATA KHUSUS MASUKAN KEDALAM KARDUS"		Pendidikan	
9	Dinas Kesehatan/UPTD Puskesmas Mujur	Pelayanan Publik	Non Digital	KASTURI (KAMPUNG SADAR TANAMAN DAN OBAT TRADISIONAL UNTUK RUMAH ASRI)		Kesehatan	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Publik	Non Digital	LAYANAN TUNGGU (LAYANAN SABTU-MINGGU)		Pencatatan Sipil	
11	UPTD BLUD Laboratorim Dan Unit Transfusi Darah	Pelayanan Publik	Non Digital	MADU IBU (MENABUNG DARAH UNTUK IBU)		Kesehatan	
12	SMP Negeri 1 Praya Tengah	Inovasi Bentuk Lainnya (Materi Pengajaran)	Non Digital	PROTAF SPENTUPRATENG "UNTUK MENINGKATKAN KULITAS DAN KUANTITAS"		Pendidikan	
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelayanan Publik	Non Digital	REBORN PLASTIC : BOTOL BEKAS SEBAGAI ALAT TANGKAP IKAN ALTERNATIF YANG RAMAH LINGKUNGAN		Pangan	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Keterangan
14	Inspektorat	Pelayanan Publik	Non Digital	PADE BAOS (PEMIMPIN APEL, DISIPLIN EKSPOSE DAN BERKAS AUDIT ON SCHEDULE)		Pelaporan	
15	SDN Gerupuk	Inovasi Bentuk Lainnya (Materi Pengajaran)	Non Digital	SASAK CERDAS "SASAK CEGAH RESIKO PERNIKAHAN DINI ANAK SEKOLAH"		Pendidikan	
Jumlah		15	15	15		15	

Lombok Tengah, 3 Maret 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah



H. LALU WIRANATA, SIP.MA
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 197611282005011006



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Raden Pugu Puyung Komplek Kantor Bupati Gedung C Lantai 3, Lombok Tengah, NTB
email: bapperida@lomboktengahkab.go.id

RINCIAN KESESUAIAN DATA PROGRAM DAN ATAU KEGIATAN ANTARA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	279522403032	279522403032	Reformasi sistem pendidikan	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	76650000	76650000	Reformasi sistem pendidikan	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1230545712	1230545712	Peningkatan SDM berkualitas	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10008000	10008000	Reformasi sistem pendidikan	
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	116326464	116326464	Revolusi mental & pembangunan kebudayaan	
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	704289358189	704289358189	Peningkatan pelayanan publik	
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	14925112192	14925112192	Revolusi mental & pembangunan kebudayaan	
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0	0	Revolusi mental & pembangunan kebudayaan	
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	130801152	130801152	Revolusi mental & pembangunan kebudayaan	
10	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	322626861282	322626861282	Reformasi sistem kesehatan	
11	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2244101264	2244101264	Peningkatan SDM berkualitas (khusus tenaga kesehatan)	
12	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	710802912	710802912	Reformasi sistem kesehatan	
13	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	525088420	525088420	Reformasi sistem kesehatan	
14	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	323216836290	323216836290	Peningkatan pelayanan publik	
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13760207192	13760207192	Ketahanan energi, pangan, dan air	
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	37165525640	37165525640	Infrastruktur ekonomi & pelayanan dasar	
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3030657760	3030657760	Infrastruktur ekonomi & pelayanan dasar	
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	40582991872	40582991872	Infrastruktur ekonomi & pelayanan dasar	
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	0	Infrastruktur ekonomi & pelayanan dasar	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	87116660752	87116660752	Infrastruktur ekonomi & pelayanan dasar	
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	25434498	25434498	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	880930832	880930832	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19340306006	19340306006	Peningkatan pelayanan publik	
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	440155248	440155248	Pembangunan perumahan dan permukiman	
25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7852824669	7852824669	Pembangunan perumahan dan permukiman	
26	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	41983508480	41983508480	Infrastruktur untuk ekonomi & pelayanan dasar	
27	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8085135600	8085135600	Peningkatan pelayanan publik	
28	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1443185536	1443185536	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
29	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	65754460	65754460	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
30	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	10695008	10695008	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
31	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2131415876	2131415876	Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	
32	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13418708889	13418708889	Peningkatan pelayanan publik	
33	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	752703668	752703668	Ketahanan bencana & perubahan iklim	
34	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9042425680	9042425680	Peningkatan pelayanan publik	
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1177648820	1177648820	Ketahanan bencana & perubahan iklim	
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4524005438	4524005438	Peningkatan pelayanan publik	
37	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	845946083	845946083	Penguatan perlindungan sosial	
38	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0	0	Penguatan perlindungan sosial	
39	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1463473066	1463473066	Penguatan perlindungan sosial	
40	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1709333304	1709333304	Penguatan perlindungan sosial	
41	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	170727674	170727674	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	

42	Dinas Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	161609710	161609710	Revolusi mental & pembangunan kebudayaan	
43	Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3525330430	3525330430	Peningkatan pelayanan publik	
44	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	45781916	45781916	Penguatan ketenagakerjaan & kesempatan kerja	
45	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1764842206	1764842206	Penguatan ketenagakerjaan & kesempatan kerja	
46	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	506983702	506983702	Penguatan ketenagakerjaan & kesempatan kerja	
47	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1473284280	1473284280	Penguatan ketenagakerjaan & kesempatan kerja	
48	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	733438652	733438652	Peningkatan pelayanan publik	
49	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	15369998	15369998	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	23793960	23793960	Penguatan perlindungan sosial	
51	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	253583432	253583432	Penguatan perlindungan sosial	
52	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	69596848	69596848	Peningkatan SDM berkualitas	
53	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	158101184	158101184	Penguatan perlindungan sosial	
54	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	571857232	571857232	Penguatan perlindungan sosial	
55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3887534824	3887534824	Peningkatan pelayanan publik	
56	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	583221328	583221328	Penguatan perlindungan sosial	
57	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	461073153	461073153	Penguatan perlindungan sosial	
58	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	548963996	548963996	Penguatan perlindungan sosial	
59	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SDA UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	0	0	Ketahanan energi, pangan, dan air	
60	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2365969462	2365969462	Ketahanan energi, pangan, dan air	
61	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	621112698	621112698	Ketahanan energi, pangan, dan air	
62	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	176175012	176175012	Ketahanan energi, pangan, dan air	
63	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3088369954	3088369954	Peningkatan pelayanan publik	
64	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	86731928	86731928	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
65	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	213668270	213668270	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
66	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	18644003	18644003	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
67	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN PPLH	76498058	76498058	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
68	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10525040	10525040	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
69	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	560544656	560544656	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
70	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	715607494	715607494	Peningkatan pelayanan publik	
71	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	88574327	88574327	Peningkatan pelayanan publik	
72	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	64247692	64247692	Peningkatan pelayanan publik	
73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	95984184	95984184	Peningkatan pelayanan publik	
74	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	54597864	54597864	Peningkatan pelayanan publik	
75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	545430976	545430976	Peningkatan pelayanan publik	
76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMETAAN DESA	72473600	72473600	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	945713960	945713960	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	295692490	295692490	Peningkatan pelayanan publik	
79	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, ADAT, MASYARAKAT HUKUM ADAT	125487527	125487527	Revolusi mental & pembangunan kebudayaan	
80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	385398590	385398590	Peningkatan pelayanan publik	

81	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1465879600	1465879600	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	
82	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2965892	2965892	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	
83	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	601351193	601351193	Peningkatan pelayanan publik	
84	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3430631304	3430631304	Peningkatan SDM berkualitas	
85	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1479195456	1479195456	Peningkatan SDM berkualitas	
86	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	336881360	336881360	Revolusi mental & pembangunan kebudayaan	
87	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2921487183	2921487183	Peningkatan pelayanan publik	
88	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2498464914	2498464914	Peningkatan SDM berkualitas	
89	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	42857320	42857320	Revolusi mental & pembangunan kebudayaan	
90	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5469735215	5469735215	Peningkatan pelayanan publik	
91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	235244632	235244632	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan	
92	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	10485000	10485000	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan	
93	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	7845955	7845955	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan	
94	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1195643135	1195643135	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
95	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3472543436	3472543436	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
96	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	307578504	307578504	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
97	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5300722146	5300722146	Peningkatan pelayanan publik	
98	Dinas Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	627007744	627007744	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
99	Dinas Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	825246096	825246096	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
100	Dinas Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1132330368	1132330368	Peningkatan SDM berkualitas	
101	Dinas Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5581826388	5581826388	Peningkatan pelayanan publik	
102	Dinas Pertanian	PROGRAM SARANA PERTANIAN	3374106270	3374106270	Ketahanan energi, pangan, dan air	
103	Dinas Pertanian	PROGRAM PRASARANA PERTANIAN	819250384	819250384	Ketahanan energi, pangan, dan air	
104	Dinas Pertanian	PROGRAM KESEHATAN HEWAN DAN VETERINER	3051944448	3051944448	Reformasi sistem kesehatan	
105	Dinas Pertanian	PROGRAM BENCANA PERTANIAN	378500544	378500544	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
106	Dinas Pertanian	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	191580672	191580672	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
107	Dinas Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4863724352	4863724352	Peningkatan SDM berkualitas	
108	Dinas Pertanian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30155900704	30155900704	Peningkatan pelayanan publik	
109	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2717930800	2717930800	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
110	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	7638800	7638800	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
111	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	160077328	160077328	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
112	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI	6615039095	6615039095	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
113	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1449246322	1449246322	Peningkatan pelayanan publik	
114	Sekretariat Daerah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	8469218128	8469218128	Peningkatan pelayanan publik	
115	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29101722036	29101722036	Peningkatan pelayanan publik	
116	Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH FUNGSI DPRD	2141971585	2141971585	Peningkatan pelayanan publik	
117	Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4182611958	4182611958	Peningkatan pelayanan publik	
118	Dinas Pariwisata	PEMASARAN PARIWISATA	825240696	825240696	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
119	Dinas Pariwisata	PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA & EKONOMI KREATIF	1132303368	1132303368	Peningkatan SDM berkualitas	
120	Dinas Pariwisata	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	558182638	558182638	Peningkatan pelayanan publik	
121	Dinas Pertanian	SARANA PERTANIAN	33741086720	33741086720	Ketahanan energi, pangan, dan air	
122	Dinas Pertanian	PRASARANA PERTANIAN	8192520384	8192520384	Ketahanan energi, pangan, dan air	
123	Dinas Pertanian	KESEHATAN HEWAN & VETERINER	3059144488	3059144488	Reformasi sistem kesehatan	
124	Dinas Pertanian	BENCANA PERTANIAN	378500544	378500544	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
125	Dinas Pertanian	PERIZINAN USAHA PERTANIAN	191580672	191580672	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
126	Dinas Pertanian	PENYULUHAN PERTANIAN	4863724325	4863724325	Peningkatan SDM berkualitas	
127	Dinas Pertanian	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30155900704	30155900704	Peningkatan pelayanan publik	
128	Dinas Perindustrian & Perdagangan	SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2717930800	2717930800	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
129	Dinas Perindustrian & Perdagangan	PENGEMBANGAN EKSPOR	76388000	76388000	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
130	Dinas Perindustrian & Perdagangan	STANDARDISASI & PERLINDUNGAN KONSUMEN	160077328	160077328	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	

131	Dinas Perindustrian & Perdagangan	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6615039059	6615039059	Peningkatan pelayanan publik	
132	Dinas Perindustrian & Perdagangan	PERENCANAAN & PEMBANGUNAN INDUSTRI	1449246322	1449246322	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
133	Sekretariat Daerah	PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT	8469281828	8469281828	Peningkatan pelayanan publik	
134	Sekretariat Daerah	PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	1811688000	1811688000	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
135	Sekretariat Daerah	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	29101722008	29101722008	Peningkatan pelayanan publik	
136	Sekretariat DPRD	DUKUNGAN TUGAS & FUNGSI DPRD	21417917635	21417917635	Peningkatan pelayanan publik	
137	Sekretariat DPRD	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	41820611958	41820611958	Peningkatan pelayanan publik	
138	Bappeda (Badan Perencanaan)	PERENCANAAN, PENGENDALIAN & EVALUASI PEMBANGUNAN	1290736984	1290736984	Transformasi digital & tata kelola pemerintahan	
139	Bappeda	KOORDINASI & SINKRONISASI PERENCANAAN	2553321226	2553321226	Transformasi digital & tata kelola pemerintahan	
140	Bappeda	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	770905529	770905529	Peningkatan pelayanan publik	
141	Bappeda	PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH	1223445568	1223445568	Penguatan riset, inovasi, dan teknologi	
142	Badan Keuangan & Aset Daerah	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	39984844818	39984844818	Peningkatan pelayanan publik	
143	Badan Keuangan & Aset Daerah	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2567812154	2567812154	Peningkatan pelayanan publik	
144	Badan Pendapatan Daerah	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6606214684	6606214684	Peningkatan pelayanan publik	
145	Badan Pendapatan Daerah	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3999044582	3999044582	Peningkatan pelayanan publik	
146	Badan Kepegawaian & SDM	MANAJEMEN ASN	2693937510	2693937510	Peningkatan pelayanan publik	
147	Badan Kepegawaian & SDM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1783535039	1783535039	Peningkatan pelayanan publik	
148	Badan Kepegawaian & SDM	PENGEMBANGAN SDM	587524079	587524079	Peningkatan SDM berkualitas	
149	Inspektorat	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1155331046	1155331046	Peningkatan pelayanan publik	
150	Inspektorat	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN & ASESTENSI	3206813696	3206813696	Transformasi digital & tata kelola pemerintahan	
151	Inspektorat	PEMBINAAN & PENGAWASAN	904429295	904429295	Transformasi digital & tata kelola pemerintahan	
152	Inspektorat	PEMBINAAN & PENGAWASAN	1647333548	1647333548	Transformasi digital & tata kelola	
153	Kantor Camat Praya	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56725764	56725764	Peningkatan pelayanan publik	
154	Kantor Camat Praya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10852011339	10852011339	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
155	Kantor Camat Praya	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36280576	36280576	Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	
156	Kantor Camat Praya	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	500831776	500831776	Peningkatan pelayanan publik	
157	Kantor Camat Praya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10391900	10391900	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
158	Kantor Camat Praya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10392780135	10392780135	Peningkatan pelayanan publik	
159	Kantor Camat Praya Tengah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24086181	24086181	Peningkatan pelayanan publik	
160	Kantor Camat Praya Tengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3684256736	3684256736	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
161	Kantor Camat Praya Tengah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46353150	46353150	Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	
162	Kantor Camat Praya Tengah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	234249750	234249750	Peningkatan pelayanan publik	
163	Kantor Camat Praya Tengah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37459436	37459436	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
164	Kantor Camat Praya Tengah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4920973275	4920973275	Peningkatan pelayanan publik	
165	Kantor Camat Praya Barat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59614540	59614540	Peningkatan pelayanan publik	
166	Kantor Camat Praya Barat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27832862	27832862	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
167	Kantor Camat Praya Barat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	89943272	89943272	Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	
168	Kantor Camat Praya Barat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	372153888	372153888	Peningkatan pelayanan publik	
169	Kantor Camat Praya Barat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8538000	8538000	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
170	Kantor Camat Praya Barat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2310692530	2310692530	Peningkatan pelayanan publik	
171	Kantor Camat Praya Barat Daya	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	96392300	96392300	Peningkatan pelayanan publik	
172	Kantor Camat Praya Barat Daya	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5625000	5625000	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
173	Kantor Camat Praya Barat Daya	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	369885516	369885516	Peningkatan pelayanan publik	
174	Kantor Camat Praya Barat Daya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	68104390	68104390	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
175	Kantor Camat Praya Barat Daya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2422722534	2422722534	Peningkatan pelayanan publik	
176	Kantor Camat Praya Timur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	69844000	69844000	Peningkatan pelayanan publik	
177	Kantor Camat Praya Timur	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55347440	55347440	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
178	Kantor Camat Praya Timur	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27676000	27676000	Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	
179	Kantor Camat Praya Timur	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	369710528	369710528	Peningkatan pelayanan publik	
180	Kantor Camat Praya Timur	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16800000	16800000	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	

181	Kantor Camat Praya Timur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2257181148	2257181148	Peningkatan pelayanan publik	
182	Kantor Camat Pujut	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43200555	43200555	Peningkatan pelayanan publik	
183	Kantor Camat Pujut	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41259052	41259052	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
184	Kantor Camat Pujut	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44572000	44572000	Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	
185	Kantor Camat Pujut	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	426540416	426540416	Peningkatan pelayanan publik	
186	Kantor Camat Pujut	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38091700	38091700	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
187	Kantor Camat Pujut	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2892795400	2892795400	Peningkatan pelayanan publik	
188	Kantor Camat Kopang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	131535920	131535920	Peningkatan pelayanan publik	
189	Kantor Camat Kopang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40712356	40712356	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
190	Kantor Camat Kopang	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33290000	33290000	Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	
191	Kantor Camat Kopang	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	315732800	315732800	Peningkatan pelayanan publik	
192	Kantor Camat Kopang	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38457500	38457500	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
193	Kantor Camat Kopang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2716782545	2716782545	Peningkatan pelayanan publik	
194	Kantor Camat Batukliang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22001364	22001364	Peningkatan pelayanan publik	
195	Kantor Camat Batukliang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39208700	39208700	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
196	Kantor Camat Batukliang	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42112520	42112520	Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	
197	Kantor Camat Batukliang	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	326299904	326299904	Peningkatan pelayanan publik	
198	Kantor Camat Batukliang	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62652014	62652014	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
199	Kantor Camat Batukliang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1778135070	1778135070	Peningkatan pelayanan publik	
200	Kantor Camat Batukliang Utara	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42678008	42678008	Peningkatan pelayanan publik	
201	Kantor Camat Batukliang Utara	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34593000	34593000	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
202	Kantor Camat Batukliang Utara	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	75300000	75300000	Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	
203	Kantor Camat Batukliang Utara	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	245193616	245193616	Peningkatan pelayanan publik	
204	Kantor Camat Batukliang Utara	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25452000	25452000	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
205	Kantor Camat Batukliang Utara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1949184055	1949184055	Peningkatan pelayanan publik	
206	Kantor Camat Pringgarata	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89239924	89239924	Peningkatan pelayanan publik	
207	Kantor Camat Pringgarata	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43088744	43088744	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
208	Kantor Camat Pringgarata	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	114373008	114373008	Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	
209	Kantor Camat Pringgarata	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	438672192	438672192	Peningkatan pelayanan publik	
210	Kantor Camat Pringgarata	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34020000	34020000	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
211	Kantor Camat Pringgarata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2291726411	2291726411	Peningkatan pelayanan publik	
212	Kantor Camat Jonggat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	99500240	99500240	Peningkatan pelayanan publik	
213	Kantor Camat Jonggat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	31377944	31377944	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
214	Kantor Camat Jonggat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20340000	20340000	Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	
215	Kantor Camat Jonggat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	393824448	393824448	Peningkatan pelayanan publik	
216	Kantor Camat Jonggat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	91645000	91645000	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
217	Kantor Camat Jonggat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2196944904	2196944904	Peningkatan pelayanan publik	
218	Kantor Camat Janapria	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	61169468	61169468	Peningkatan pelayanan publik	
219	Kantor Camat Janapria	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29607580	29607580	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
220	Kantor Camat Janapria	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13330000	13330000	Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	
221	Kantor Camat Janapria	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	361492672	361492672	Peningkatan pelayanan publik	
222	Kantor Camat Janapria	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33585950	33585950	Pengembangan wilayah untuk pemerataan	
223	Kantor Camat Janapria	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2354346544	2354346544	Peningkatan pelayanan publik	
224	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1518931421	1518931421	Revolusi mental & pembangunan kebudayaan	

225	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1118733021	1118733021	Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	
226	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	380529778	380529778	Revolusi mental & pembangunan kebudayaan	
227	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	404465905	404465905	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri	
228	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1180083748	1180083748	Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	
229	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3221437262	3221437262	Peningkatan pelayanan publik	
TOTAL			2441729485723	2441729485723		

Praya, 3 Maret 2026
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD																					
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH																					
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2025																					
No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
		5.01	PERENCANAAN			11.553.873.905		15.829.680		36.624.400		46.506.500		11.187.771.517		11.286.732.097	100	97,69			
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.709.905.656		15.829.680		36.624.400		46.506.500		7.473.309.952		7.572.270.532	100	98,21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
			Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD (Predikat)	80								90		90		112,5				
				Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)							100		100		0						
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			242.302.047		15.829.680		36.624.400		46.506.500		241.989.540		340.950.120	100	140,71			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		1		2		1		1		100				
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1								1		1		100				
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1								1		1		100				
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1								1		1		100				
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1								1		1		100				
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1								1		1		100				
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5								5		5		100				
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2								2		2		100				
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			69.329.342		15.829.680		26.661.500		43.411.500		69.091.640		154.994.320	100	223,56			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		1		2		1		1		100				
		5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			23.904.794		-		-		-		23.900.800		23.900.800	100	99,98			
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1							1		1		100					
		5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			30.466.784		-		9.962.900		3.095.000		30.463.000		43.520.900	100	142,85			
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1							1		1		100					
		5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			28.760.800		-		-		-		-		28.760.800		28.760.800	100	100	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1								1		1		100			
	5.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			16.226.500		-		-		-		16.220.500		16.220.500	100	99,96		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1								1		1		100			
	5.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			37.957.196		-		-		-		37.927.600		37.927.600	100	99,92		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1								1		1		100			
	5.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23.384.592		-		-		-		23.382.700		23.382.700	100	99,99		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5								5		5		100			
	5.01.01.2.01.0010		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.272.039		-		-		-		12.242.500		12.242.500	100	99,76		
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2								2		2		100			
	5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.417.778.562		-		-		-		6.213.749.101		6.213.749.101	100	96,82		
			Terlaksananya Manajemen Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		60		58		57		12		12		100			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1					1				100							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		18					18				100							
	5.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.314.503.322		-		-		-		6.110.479.861		6.110.479.861	100	96,77		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		60		58		57		12		12		100			
	5.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			12.497.900		-		-		-		12.497.900		12.497.900	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1								1		1		100			
	5.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			90.777.340		-		-		-		90.771.340		90.771.340	100	99,99		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18								18		18		100			
	5.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			17.574.000		-		-		-		17.574.000		17.574.000	100	100		
		Terlaksananya Manajemen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1								1		1		100				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1							1		1		100				
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		12.024.000		-		-		-		12.024.000		12.024.000	100	100				
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1							1		1		100					
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		5.550.000		-		-		-		5.550.000		5.550.000	100	100				
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1							1		1		100					
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		35.038.070		-		-		-		35.010.500		35.010.500	100	99,92				
		Terlaksananya Manajemen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1						1		1		100						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1				1	100											
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		18.560.460		-		-		-		18.537.000		18.537.000	100	99,87				
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1							1		1		100					
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		16.477.610		-		-		-		16.473.500		16.473.500	100	99,98				
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1							1		1		100					
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		274.460.662		-		-		-		274.324.429		274.324.429	100	99,95				
		Terlaksananya Manajemen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5					5		5		5		100					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3			3	100												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2			2	100												
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1			1	100												
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20.170.914		-		-		-		20.146.500		20.146.500	100	99,88				
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5							5		5		100					
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		51.500.748		-		-		-		51.477.300		51.477.300	100	99,95				
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3							3		3		100						
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		198.488.000		-		-		-		198.399.629		198.399.629	100	99,96					
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2							2		2		100						
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		4.301.000		-		-		-		4.301.000		4.301.000	100	100					
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1							1		1		100						
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		545.090.275		-		-		-		531.267.300		531.267.300	100	97,46				
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2						2		2		100						

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
						I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3								3		3		100				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3					3		100										
		5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			69.027.150		-		-		-		68.275.000		68.275.000	100	98,91			
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2						2		2		100						
		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			256.901.610		-		-		-		255.766.300		255.766.300	100	99,56			
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3						3		3		100						
		5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			219.161.515		-		-		-		207.226.000		207.226.000	100	94,55			
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3						3		3		100						
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			177.662.040		-		-		-		159.395.082		159.395.082	100	89,72			
			Terlaksananya Pemeliharaan BMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17						17		17		100						
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			177.662.040		-		-		-		159.395.082		159.395.082	100	89,72			
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17						17		17		100						
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.290.736.993		-		-		-		1.279.971.613		1.279.971.613	100	99,17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)									100		100		0				
				Persentase Kesesuaian Program pada Renstra dengan RPJMD (Persen)	100						100		100		100						
		Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD (Persen)		100					100		100		100								
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)							100		100		0								
		Kesesuaian antara RKP dengan APBD (%)							100		100		0								
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			966.301.093		-		-		-		963.643.128		963.643.128	100	99,72				
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1								1		1		100					
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	2						2		2		100							
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2						2		2		100							
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	2						2		2		100							
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2						2		2		100							
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	344						344		344		100							

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3								3		3		100			
		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			288.989.822		-		-		-		287.369.803		287.369.803	100	99,44		
			Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1								1		1		100			
		5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			29.126.733		-		-		-		29.109.400		29.109.400	100	99,94		
			Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	2								2		2		100			
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			46.813.352		-		-		-		46.626.000		46.626.000	100	99,6		
			Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2								2		2		100			
		5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			44.141.022		-		-		-		44.131.100		44.131.100	100	99,98		
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	2								2		2		100			
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			202.106.965		-		-		-		201.595.000		201.595.000	100	99,75		
			Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2								2		2		100			
		5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			38.903.000		-		-		-		38.903.000		38.903.000	100	100		
			Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	344								344		344		100			
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			316.220.199		-		-		-		315.908.825		315.908.825	100	99,9		
			Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3								3		3		100			
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			111.706.020		-		-		-		111.645.300		111.645.300	100	99,95		
			Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2								2		2		100			
				Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	30								30		30		100			
		5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			107.379.600		-		-		-		107.320.000		107.320.000	100	99,94		
			Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2								2		2		100			
		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			4.326.420		-		-		-		4.325.300		4.325.300	100	99,97		
			Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	30								30		30		100			
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			178.388.690		-		-		-		170.342.685		170.342.685	100	95,49		
			Tersusunnya Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4								4		4		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4								4		4		100			
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			31.868.130		-		-		-		31.862.900		31.862.900	100	99,98			
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4								4		4		100				
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			146.520.560		-		-		-		138.479.785		138.479.785	100	94,51			
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4								4		4		100				
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			34.341.190		-		-		-		34.340.500		34.340.500	100	100			
		Tersusunnya Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1							1		1		100					
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1						1		100								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1						1		100								
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			6.239.730		-		-		-		6.239.500		6.239.500	100	100			
		Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1								1		1		100				
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			8.251.730		-		-		-		8.251.500		8.251.500	100	100			
		Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1								1		1		100				
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			19.849.730		-		-		-		19.849.500		19.849.500	100	100			
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1								1		1		100				
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.553.231.256		-		-		-		2.434.489.952		2.434.489.952	100	95,35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)										100		100		0			
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			690.931.160		-		-		-		669.315.260		669.315.260	100	96,87			
		Tersusunnya Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1								1		1		100				
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1						1		100								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1						1		100								

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1								1		1		100				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1								1		1		100				
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1									1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1									1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1									1		1		100			
		5.01.03.2.03.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		60.146.450		-		-		-		59.978.660		59.978.660	100	99,72			
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1								1		1		100				
		5.01.03.2.03.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		26.191.970		-		-		-		25.278.400		25.278.400	100	96,51			
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1								1		1		100				
		5.01.03.2.03.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		27.436.925		-		-		-		27.426.800		27.426.800	100	99,96			
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1								1		1		100				
		5.01.03.2.03.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		27.927.285		-		-		-		27.324.800		27.324.800	100	97,84			
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1								1		1		100				
		5.01.03.2.03.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		20.329.695		-		-		-		20.251.600		20.251.600	100	99,62			
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1								1		1		100				
		5.01.03.2.03.0006		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		324.472.815		-		-		-		317.042.900		317.042.900	100	97,71			
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1								1		1		100				
	5.01.03.2.03.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		17.581.825		-		-		-		17.577.900		17.577.900	100	99,98				
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1								1		1		100					
	5.01.03.2.03.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		186.844.195		-		-		-		174.434.200		174.434.200	100	93,36				
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1								1		1		100					

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)									100		100		0			
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			967.015.280		-		-		-		933.632.867		933.632.867	100	96,55		
			Tersusunnya Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6								6		6		100			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	6								6		6		100			
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4								4		4		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	4								4		4		100			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	9								9		9		100			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	11								11		11		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	12								12		12		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	11								11		11		100			
		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			39.887.760		-		-		-		39.773.407		39.773.407	100	99,71		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6								6		6		100			
		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			18.204.120		-		-		-		18.193.100		18.193.100	100	99,94		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	6								6		6		100			
		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			24.178.000		-		-		-		24.156.700		24.156.700	100	99,91		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4								4		4		100			
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			68.717.320		-		-		-		68.664.760		68.664.760	100	99,92		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	4								4		4		100			
		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			194.232.000		-		-		-		164.221.400		164.221.400	100	84,55		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	9								9		9		100			
		5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		29.069.200		-		-		-		29.060.600		29.060.600	100	99,97			
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	11							11		11		100				
		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		38.046.220		-		-		-		38.004.000		38.004.000	100	99,89			
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	12							12		12		100				
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		554.680.660		-		-		-		551.558.900		551.558.900	100	99,44			
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	11							11		11		100				
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)									100		100		0			
				Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang P2M (Persen)	100								100		100		100			
				Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Ekonomi dan SDA ()									100		100		0			
Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)				100							100		100		100					
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		895.284.816		-		-		-		831.541.825		831.541.825	100	92,88				
		Tersusunnya Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1								1		1		100				
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1								1		1		100				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1								1		1		100				
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1								1		1		100				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1								1		1		100				
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1								1		1		100				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1								1		1		100				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			85.915.677		-		-		-		85.233.410		85.233.410	100	99,21		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			28.492.818		-		-		-		25.491.600		25.491.600	100	89,47		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			9.440.984		-		-		-		9.194.200		9.194.200	100	97,39		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			335.948.094		-		-		-		319.097.500		319.097.500	100	94,98		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			27.967.346		-		-		-		27.781.215		27.781.215	100	99,33		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			13.470.706		-		-		-		12.870.300		12.870.300	100	95,54		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			14.049.006		-		-		-		14.043.400		14.043.400	100	99,96		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			380.000.185		-		-		-		337.830.200		337.830.200	100	88,9		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1								1		1		100			
		5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.232.445.521		-		-		-		1.216.665.730		1.216.665.730	66,67	98,72		
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			1.232.445.521		-		-		-		1.216.665.730		1.216.665.730	66,67	98,72	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (Persen)	100								100	100	100		100			
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)								100	0							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Ketepatan waktu pembuatan SPD Gaji dan data pegawai yang valid
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: Adanya pegawai yang pensiun dan mutasi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Perlunya penambahan pegawai untuk mengisi posisi yang kosong
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	: Menyusun anjab ABK yang rasional

Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kondisi Sampai Dengan : Triwulan IV Tahun 2025

No.	Kode	Uraian Program / Kegiatan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	242.302.047	100,00	340.950.120	140,71
2	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.417.778.562	100,00	6.213.749.101	96,82
3	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.574.000	100,00	17.574.000	100,00
4	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.038.070	100,00	35.010.500	99,92
5	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.460.662	100,00	274.324.429	99,95
6	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	545.090.275	75,00	531.267.300	97,46
7	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	0,00
8	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.662.040	100,00	159.395.082	89,72
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
9	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	966.301.093	100,00	963.643.128	99,72
10	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	111.706.020	100,00	111.645.300	99,95
11	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	178.388.690	100,00	170.342.685	95,49
12	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	34.341.190	100,00	34.340.500	100,00
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
13	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	967.015.280	100,00	933.632.867	96,55
14	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	895.284.816	100,00	831.541.825	92,88
15	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	690.931.160	100,00	669.315.260	96,87
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
16	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	658.744.746	50,00	643.396.790	97,67
17	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	0,00	-	0,00
18	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-		-	0,00
19	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	573.700.775	50,00	573.268.940	99,92
	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				
20	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-		-	0,00
21	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	-		-	0,00
	TOTAL		12.786.319.426	94,03	12.503.397.827	97,79

Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kondisi Sampai Dengan : Triwulan IV Tahun 2025

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.709.905.656	112,50	100,00	7.572.270.532	98,21
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.290.736.993	100,00	100,00	1.279.971.613	99,17
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.553.231.256	100,00	100,00	2.434.489.952	95,35
4	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.232.445.521	100,00	66,67	1.216.665.730	98,72
	TOTAL		12.786.319.426	102,08	98,44	12.503.397.827	97,79

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD																					
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH																					
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2025																					
No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
		5.01	PERENCANAAN			11.553.873.905		15.829.680		36.624.400		46.506.500		11.187.771.517		11.286.732.097	100	97,69			
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.709.905.656		15.829.680		36.624.400		46.506.500		7.473.309.952		7.572.270.532	100	98,21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
			Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD (Predikat)	80								90		90		112,5				
				Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)							100		100		0						
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			242.302.047		15.829.680		36.624.400		46.506.500		241.989.540		340.950.120	100	140,71			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		1		2		1		1		100				
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1								1		1		100				
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1								1		1		100				
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1								1		1		100				
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1								1		1		100				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		1							1		1		100						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		5							5		5		100						
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		2							2		2		100						
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			69.329.342		15.829.680		26.661.500		43.411.500		69.091.640		154.994.320	100	223,56				
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		1		2		1		1		100					
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			23.904.794		-		-		-		23.900.800		23.900.800	100	99,98				
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1							1		1		100						
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			30.466.784		-		9.962.900		3.095.000		30.463.000		43.520.900	100	142,85				
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1								1		1		100					
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			28.760.800		-		-		-		-		28.760.800		28.760.800	100	100		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1								1		1		100			
		5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		16.226.500		-		-		-		16.220.500		16.220.500	100	99,96			
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1								1		1		100			
		5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		37.957.196		-		-		-		37.927.600		37.927.600	100	99,92			
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1								1		1		100			
		5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23.384.592		-		-		-		23.382.700		23.382.700	100	99,99			
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5								5		5		100			
		5.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12.272.039		-		-		-		12.242.500		12.242.500	100	99,76			
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2								2		2		100			
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.417.778.562		-		-		-		6.213.749.101		6.213.749.101	100	96,82				
		Terlaksananya Manajemen Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		60		58		57		12		12		100				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1						1		1		100						
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		18					18		18		100								
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.314.503.322		-		-		-		6.110.479.861		6.110.479.861	100	96,77				
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		60		58		57		12		12		100				
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12.497.900		-		-		-		12.497.900		12.497.900	100	100				
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1								1		1		100				
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		90.777.340		-		-		-		90.771.340		90.771.340	100	99,99				
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18								18		18		100				
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		17.574.000		-		-		-		17.574.000		17.574.000	100	100			
			Terlaksananya Manajemen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1							1		1		100				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1							1		1		100				
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			12.024.000		-		-		-		12.024.000		12.024.000	100	100			
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1								1		1		100				
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.550.000		-		-		-		5.550.000		5.550.000	100	100			
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1								1		1		100				
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			35.038.070		-		-		-		35.010.500		35.010.500	100	99,92			
		Terlaksananya Manajemen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1								1		1		100				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1												100				
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			18.560.460		-		-		-		18.537.000		18.537.000	100	99,87			
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1								1		1		100				
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			16.477.610		-		-		-		16.473.500		16.473.500	100	99,98			
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1								1		1		100				
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			274.460.662		-		-		-		274.324.429		274.324.429	100	99,95			
		Terlaksananya Manajemen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5								5		5		100				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3										3		100				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2										2		100				
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1									1		100						
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.170.914		-		-		-		20.146.500		20.146.500	100	99,88			
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5								5		5		100				
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			51.500.748		-		-		-		51.477.300		51.477.300	100	99,95			
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3								3		3		100					
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			198.488.000		-		-		-		198.399.629		198.399.629	100	99,96				
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2								2		2		100					
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			4.301.000		-		-		-		4.301.000		4.301.000	100	100				
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1								1		1		100					
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			545.090.275		-		-		-		531.267.300		531.267.300	100	97,46			
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2							2		2		100					

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
						I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3								3		3		100				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3							3		3		100						
		5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			69.027.150		-		-		-		68.275.000		68.275.000	100	98,91			
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2							2		2		100					
		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			256.901.610		-		-		-		255.766.300		255.766.300	100	99,56			
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3							3		3		100					
		5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			219.161.515		-		-		-		207.226.000		207.226.000	100	94,55			
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3							3		3		100					
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			177.662.040		-		-		-		159.395.082		159.395.082	100	89,72			
			Terlaksananya Pemeliharaan BMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17							17		17		100					
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			177.662.040		-		-		-		159.395.082		159.395.082	100	89,72			
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17							17		17		100					
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.290.736.993		-		-		-		1.279.971.613		1.279.971.613	100	99,17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)									100		100		0				
				Persentase Kesesuaian Program pada Renstra dengan RPJMD (Persen)	100								100		100		100				
		Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD (Persen)		100							100		100		100						
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)									100		100		0						
		Kesesuaian antara RKP dengan APBD (%)									100		100		0						
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			966.301.093		-		-		-		963.643.128		963.643.128	100	99,72				
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1								1		1		100					
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	2								2		2		100					
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2								2		2		100					
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	2								2		2		100					
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2								2		2		100					
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	344								344		344		100					

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3								3		3		100			
		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			288.989.822		-		-		-		287.369.803		287.369.803	100	99,44		
			Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1								1		1		100			
		5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			29.126.733		-		-		-		29.109.400		29.109.400	100	99,94		
			Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	2								2		2		100			
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			46.813.352		-		-		-		46.626.000		46.626.000	100	99,6		
			Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2								2		2		100			
		5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			44.141.022		-		-		-		44.131.100		44.131.100	100	99,98		
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	2								2		2		100			
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			202.106.965		-		-		-		201.595.000		201.595.000	100	99,75		
			Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2								2		2		100			
		5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			38.903.000		-		-		-		38.903.000		38.903.000	100	100		
			Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	344								344		344		100			
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			316.220.199		-		-		-		315.908.825		315.908.825	100	99,9		
			Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3								3		3		100			
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			111.706.020		-		-		-		111.645.300		111.645.300	100	99,95		
			Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2								2		2		100			
				Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	30								30		30		100			
		5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			107.379.600		-		-		-		107.320.000		107.320.000	100	99,94		
			Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2								2		2		100			
		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			4.326.420		-		-		-		4.325.300		4.325.300	100	99,97		
			Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	30								30		30		100			
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			178.388.690		-		-		-		170.342.685		170.342.685	100	95,49		
			Tersusunnya Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4								4		4		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4							4		4		100				
		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		31.868.130		-		-		-		31.862.900		31.862.900	100	99,98			
			Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4							4		4		100				
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		146.520.560		-		-		-		138.479.785		138.479.785	100	94,51			
			Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4							4		4		100				
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		34.341.190		-		-		-		34.340.500		34.340.500	100	100			
			Tersusunnya Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1							1		1		100				
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1							1		1		100				
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1							1		1		100				
		5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		6.239.730		-		-		-		6.239.500		6.239.500	100	100			
			Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1							1		1		100				
		5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		8.251.730		-		-		-		8.251.500		8.251.500	100	100			
			Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1							1		1		100				
		5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		19.849.730		-		-		-		19.849.500		19.849.500	100	100			
			Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1							1		1		100				
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			2.553.231.256		-		-		-	2.434.489.952		2.434.489.952	100	95,35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)								100		100		0				
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		690.931.160		-		-		-		669.315.260		669.315.260	100	96,87			
			Tersusunnya Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1							1		1		100				
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1							1		1		100				
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1							1		1		100				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1								1		1		100				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1								1		1		100				
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1									1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1									1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1									1		1		100			
		5.01.03.2.03.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		60.146.450		-		-		-		59.978.660		59.978.660	100	99,72			
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1								1		1		100				
		5.01.03.2.03.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		26.191.970		-		-		-		25.278.400		25.278.400	100	96,51			
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1								1		1		100				
		5.01.03.2.03.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		27.436.925		-		-		-		27.426.800		27.426.800	100	99,96			
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1								1		1		100				
		5.01.03.2.03.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		27.927.285		-		-		-		27.324.800		27.324.800	100	97,84			
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1								1		1		100				
		5.01.03.2.03.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		20.329.695		-		-		-		20.251.600		20.251.600	100	99,62			
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1								1		1		100				
		5.01.03.2.03.0006		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		324.472.815		-		-		-		317.042.900		317.042.900	100	97,71			
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1								1		1		100				
	5.01.03.2.03.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		17.581.825		-		-		-		17.577.900		17.577.900	100	99,98				
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1								1		1		100					
	5.01.03.2.03.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		186.844.195		-		-		-		174.434.200		174.434.200	100	93,36				
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1								1		1		100					

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)									100		100		0			
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			967.015.280		-		-		-		933.632.867		933.632.867	100	96,55		
			Tersusunnya Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6								6		6		100			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	6								6		6		100			
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4								4		4		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	4								4		4		100			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	9								9		9		100			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	11								11		11		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	12								12		12		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	11								11		11		100			
		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			39.887.760		-		-		-		39.773.407		39.773.407	100	99,71		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6								6		6		100			
		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			18.204.120		-		-		-		18.193.100		18.193.100	100	99,94		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	6								6		6		100			
		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			24.178.000		-		-		-		24.156.700		24.156.700	100	99,91		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4								4		4		100			
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			68.717.320		-		-		-		68.664.760		68.664.760	100	99,92		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	4								4		4		100			
		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			194.232.000		-		-		-		164.221.400		164.221.400	100	84,55		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			85.915.677		-		-		-		85.233.410		85.233.410	100	99,21		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			28.492.818		-		-		-		25.491.600		25.491.600	100	89,47		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			9.440.984		-		-		-		9.194.200		9.194.200	100	97,39		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			335.948.094		-		-		-		319.097.500		319.097.500	100	94,98		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			27.967.346		-		-		-		27.781.215		27.781.215	100	99,33		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			13.470.706		-		-		-		12.870.300		12.870.300	100	95,54		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			14.049.006		-		-		-		14.043.400		14.043.400	100	99,96		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1								1		1		100			
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			380.000.185		-		-		-		337.830.200		337.830.200	100	88,9		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1								1		1		100			
		5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.232.445.521		-		-		-		1.216.665.730		1.216.665.730	66,67	98,72		
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			1.232.445.521		-		-		-		1.216.665.730		1.216.665.730	66,67	98,72	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (Persen)	100								100		100		100			
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)								100	100		0					

Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kondisi Sampai Dengan : Triwulan IV Tahun 2025

No.	Kode	Uraian Program / Kegiatan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	242.302.047	100,00	340.950.120	140,71
2	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.417.778.562	100,00	6.213.749.101	96,82
3	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.574.000	100,00	17.574.000	100,00
4	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.038.070	100,00	35.010.500	99,92
5	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.460.662	100,00	274.324.429	99,95
6	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	545.090.275	75,00	531.267.300	97,46
7	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	0,00
8	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.662.040	100,00	159.395.082	89,72
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
9	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	966.301.093	100,00	963.643.128	99,72
10	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	111.706.020	100,00	111.645.300	99,95
11	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	178.388.690	100,00	170.342.685	95,49
12	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	34.341.190	100,00	34.340.500	100,00
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
13	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	967.015.280	100,00	933.632.867	96,55
14	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	895.284.816	100,00	831.541.825	92,88
15	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	690.931.160	100,00	669.315.260	96,87
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
16	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	658.744.746	50,00	643.396.790	97,67
17	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	0,00	-	0,00
18	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-		-	0,00
19	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	573.700.775	50,00	573.268.940	99,92
	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				
20	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-		-	0,00
21	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	-		-	0,00
	TOTAL		12.786.319.426	94,03	12.503.397.827	97,79

Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kondisi Sampai Dengan : Triwulan IV Tahun 2025

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.709.905.656	112,50	100,00	7.572.270.532	98,21
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.290.736.993	100,00	100,00	1.279.971.613	99,17
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.553.231.256	100,00	100,00	2.434.489.952	95,35
4	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.232.445.521	100,00	66,67	1.216.665.730	98,72
	TOTAL		12.786.319.426	102,08	98,44	12.503.397.827	97,79

Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kondisi Sampai Dengan : Triwulan I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program / Kegiatan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.305.274	5,56	52.646.000	22,37
2	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.085.996.573	33,33	415.031.291	6,82
3	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.387.800	0,00	-	0,00
4	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.913.300	0,00	8.055.000	19,22
5	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.926.438	0,00	37.990.000	14,02
6	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	255.719.010	60,00	174.619.998	68,29
7	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.352.000	100,00	21.000.000	24,32
8	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.220.040	0,00	-	0,00
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
9	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	402.390.820	78,57	150.866.190	37,49
10	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	181.466.640	0,00	8.131.340	4,48
11	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	588.201.050	25,00	39.335.180	6,69
12	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	26.989.870	0,00	-	0,00
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
13	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	796.982.265	0,00	160.623.000	20,15
14	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	917.514.518	12,50	56.877.500	6,20
15	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	472.909.995	0,00	26.011.550	5,50
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
16	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-		-	0,00
17	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	460.107.476	0,00	21.062.200	4,58
18	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	114.534.038	0,00	-	0,00
19	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	95.329.170	0,00	12.851.794	13,48
	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				
20	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	53.549.170	0,00	-	0,00
21	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	377.590.290	21,00	52.488.996	13,90
	TOTAL		11.592.385.737	17,34	1.237.590.039	10,68

Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kondisi Sampai Dengan : Triwulan I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.104.820.435	0,00	17,20	709.342.289	9,98
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.199.048.380	100,00	50,00	198.332.710	16,54
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.187.406.778	100,00	4,17	243.512.050	11,13
4	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	669.970.684	10,00	0,00	33.913.994	5,06
5	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	431.139.460	5,00	16,80	52.488.996	12,17
	TOTAL		11.592.385.737	41,56	17,34	1.237.590.039	10,68

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2026

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket						
								I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01	PERENCANAAN			66.453.503.990		11.258.631.097		10.491.275.593		1.151.187.049							1.151.187.049		1.151.187.049	5,36	1,73			
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			42.198.850.000		7.572.270.532		7.104.820.435		709.342.289							709.342.289		709.342.289	7,82	1,68	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
			Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100		100		100		0							0		0		0				
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.176.198.275		340.950.120		235.305.274		52.646.000							52.646.000		52.646.000	0,95	2,42			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21		1		4		2								2		2		9,52			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0						0									
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0						0									
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0						0									
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0						0									
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60		1		12		0						0									
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		5		1		0						0									
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	4		0		0		0						0									
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5		0		1		0						0									
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	6		2		1		0						0									
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			350.601.873		154.994.320		39.663.128		5.801.000						5.801.000		5.801.000	9,52	1,65				
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21		1		4		2							2		2		9,52				
		5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			201.830.668		23.900.800		29.030.678		-						-		-	0	0				
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0							0		0		0				
		5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			195.408.732		43.520.900		39.730.678		-						-		-	0	0				
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0							0		0		0				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			189.874.590		28.760.800		13.624.940		13.615.000							13.615.000		13.615.000	0	7,17			
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			209.373.777		16.220.500		19.356.750		-							-		-	0	0			
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			295.711.870		37.927.600		48.529.350		25.505.000							25.505.000		25.505.000	0	8,62			
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60		1		12		0								0		0					
		5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			330.684.737		23.382.700		33.887.850		7.725.000							7.725.000		7.725.000	0	2,34			
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		5		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			259.622.831		-		-		-							-		-	0	0			
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	4		0		0		0								0		0		0			
		5.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			87.772.398		-		3.685.950		-							-		-	0	0			
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5		0		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			55.316.799		12.242.500		7.795.950		-							-		-	0	0			
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	6		2		1		0								0		0		0			
			5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32.375.875.296		6.213.749.101		6.085.996.573		415.031.291						415.031.291		415.031.291	33,33	1,28			
			Terlaksananya Manajemén Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		12		60		60							60		60		100				
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		5	1		1		0				0		0		0									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		90	18		18		0				0		0		0									
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			31.560.595.202		6.110.479.861		6.044.762.503		411.190.291						411.190.291		411.190.291	100	1,3				
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		12		60		60							60		60		100				
		5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			259.511.855		12.497.900		10.516.270		-						-		-	0	0				
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0							0		0		0				
		5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			555.768.239		90.771.340		30.717.800		3.841.000							3.841.000		3.841.000	0	0,69			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	90		18		18		0							0		0		0					
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			193.443.790		17.574.000		22.387.800		-							-		-	0	0				
			Terlaksananya Manajemen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		1		1		0							0		0		0					
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		1		1		0							0				0				0	
		5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			81.890.085		12.024.000		11.451.900		-						-		-	0	0					
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		1		1		0							0		0		0					
		5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			111.553.705		5.550.000		10.935.900		-						-		-	0	0					
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		1		1		0							0		0		0					
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			297.917.256		35.010.500		41.913.300		8.055.000						8.055.000		8.055.000	0	2,7					
			Terlaksananya Manajemen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		1		1		0							0		0		0					
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	60		1		12		0							0				0				0	
		5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			125.155.552		18.537.000		21.977.850		4.910.000						4.910.000		4.910.000	0	3,92					
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		1		1		0							0		0		0					
		5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			172.761.704		16.473.500		19.935.450		3.145.000						3.145.000		3.145.000	0	1,82					
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	60		1		12		0							0		0		0					
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.682.066.366		274.324.429		270.926.438		37.990.000						37.990.000		37.990.000	0	1,42					
			Terlaksananya Manajemen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		1		0							0		0		0					
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		3		1		0									0		0				0	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	240		2		48		0									0		0				0	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		1		1		0									0		0				0	
		5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			233.889.591		20.146.500		21.546.438		3.474.000						3.474.000		3.474.000	0	1,49					
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		1		0							0		0		0					
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			541.680.292		51.477.300		42.269.088		5.996.000						5.996.000		5.996.000	0	1,11					
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		3		1		0							0		0		0					
		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.855.930.483		198.399.629		202.672.532		28.520.000						28.520.000		28.520.000	0	1,54					
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	240		2		48		0							0		0		0					

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket						
								I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			50.566.000		4.301.000		4.438.380		-							-		-	0	0			
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0				
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.147.519.165		531.267.300		255.719.010		174.619.998							174.619.998		174.619.998	0,37	5,55			
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	117		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2845		2		5		5						5		5		0,18					
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	305		3		5		4						4		4		1,31					
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	68		3		1		0						0		0		0					
		5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			475.187.200		-		-		-							-		-	0	0			
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	117		0		0		0								0		0		0			
		5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			506.548.640		68.275.000		60.000.000		-								-		-	0,18	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2845		2		5		5								5		5		0,18			
		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.234.673.413		255.766.300		185.639.850		174.619.998								174.619.998		174.619.998	1,31	14,14		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	305		3		5		4								4		4		1,31			
		5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			931.109.912		207.226.000		10.079.160		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	68		3		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			270.000.000		-		86.352.000		21.000.000								21.000.000		21.000.000	100	7,78		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14		0		14		14								14		14		100			
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			270.000.000		-		86.352.000		21.000.000								21.000.000		21.000.000	100	7,78		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14		0		14		14								14		14		100			
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.055.829.852		159.395.082		106.220.040		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan BMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		17		22		0								0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	139		0		0		0						0		0		0					
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		159.395.082		106.220.040		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		17		22		0								0		0		0			
		5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.055.829.852		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	139		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			8.654.295.000		1.251.870.613		1.199.048.380		198.332.710								198.332.710		198.332.710	8,89	2,29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100		100		100		100							100		100		100				
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100		100		100		100							100		100		100				
				Kesesuaian antara RKP dengan APBD (%)	100		100		100		100							100		100		100				
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			3.989.950.215		963.643.128		402.390.820		150.866.190								150.866.190		150.866.190	13,81	3,78		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	6		1		1		1								1		1		16,67			
				Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	15		2		3		0								0		0					
				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	6		2		1		1								1		1		16,67			
				Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	6		2		1		2								2		2		33,33			
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	10		2		2		1								1		1		10			
				Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1720		344		344		344								344		344		20			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	15		3		3		0								0		0		0			
		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			879.679.134		287.369.803		37.930.350		22.715.850								22.715.850		22.715.850	16,67	2,58		
			Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	6		1		1		1								1		1		16,67			
		5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			514.039.394		29.109.400		38.266.478		4.306.470								4.306.470		4.306.470	0	0,84		
			Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	15		2		3		0								0		0		0			
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			555.431.864		46.626.000		83.514.066		58.354.550								58.354.550		58.354.550	16,67	10,51		
			Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	6		2		1		1								1		1		16,67			
		5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			163.012.354		44.131.100		23.319.804		23.031.760								23.031.760		23.031.760	33,33	14,13		
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	6		2		1		2								2		2		33,33			
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			871.257.229		201.595.000		114.732.762		35.257.560								35.257.560		35.257.560	10	4,05		
			Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	10		2		2		1								1		1		10			
		5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			342.905.439		38.903.000		12.240.000		7.200.000								7.200.000		7.200.000	20	2,1		
			Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1720		344		344		344								344		344		20			
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			663.624.801		315.908.825		92.387.360		-							-		-	0	0			
			Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	15		3		3		0								0		0		0			
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.006.487.618		111.645.300		181.466.640		8.131.340								8.131.340		8.131.340	0	0,81		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	25		1		5		0							0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	25		1		5		0							0		0		0				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15		1		3		0							0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	15		1		3		0							0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	15		1		3		0							0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	15		1		3		0							0		0		0				
		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			312.543.352		85.233.410		132.286.760		12.100.000							12.100.000		12.100.000	0	3,87			
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	25		1		5		0							0		0		0				
		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			289.773.392		25.491.600		52.139.060		8.530.000							8.530.000		8.530.000	20	2,94			
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	25		1		5		5							5		5		20				
		5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			198.678.477		9.194.200		44.438.460		6.565.000							6.565.000		6.565.000	0	3,3			
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	25		1		5		0							0		0		0				
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			1.508.857.302		319.097.500		462.686.190		20.774.900							20.774.900		20.774.900	0	1,38			
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	25		1		5		0							0		0		0				
		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			721.250.662		27.781.215		25.822.170		2.400.000							2.400.000		2.400.000	0	0,33			
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15		1		3		0							0		0		0				
		5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			212.271.362		12.870.300		21.954.060		4.500.000							4.500.000		4.500.000	0	2,12			
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	15		1		3		0							0		0		0				
		5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			142.681.362		14.043.400		28.649.060		1.116.000							1.116.000		1.116.000	0	0,78			
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	15		1		3		0							0		0		0				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab		Ket	
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%				
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			2.041.294.343		337.830.200		149.538.758		891.600							891.600		891.600	0	0,04					
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	15		1		3		0							0		0		0						
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100		100		100		100							100		100		100						
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			3.787.327.031		669.315.260		472.909.995		26.011.550							26.011.550		26.011.550	0	0,69					
			Tersusunnya Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15		1		1		0							0		0		0						
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		1		1		0							0		0		0						
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		1		1		0							0		0		0						
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		1		1		0							0		0		0						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	10		1		1		0							0		0		0						
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	10		1		1		0							0		0		0						
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	10		1		1		0							0		0		0						
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	10		1		1		0							0		0		0						
		5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			266.242.782		59.978.660		44.940.195		3.019.000							3.019.000		3.019.000	0	1,13					
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15		1		1		0							0		0		0						
		5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			366.242.782		25.278.400		50.294.005		3.600.000							3.600.000		3.600.000	0	0,98					
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		1		1		0							0		0		0						
		5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			221.268.807		27.426.800		18.221.895		3.356.600							3.356.600		3.356.600	0	1,52					
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		1		1		0							0		0		0						
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			1.468.606.882		27.324.800		251.559.810		5.670.550							5.670.550		5.670.550	0	0,39					
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		1		1		0							0		0		0						
		5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			266.284.782		20.251.600		26.025.990		4.519.400							4.519.400		4.519.400	0	1,7					

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab		Ket	
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%				
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	10		1		1		0								0		0		0					
		5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			767.900.857		317.042.900		48.921.305		3.780.000								3.780.000		3.780.000	0	0,49				
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	10		1		1		0								0		0		0					
		5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)		206.718.307		17.577.900		15.094.795		1.653.000								1.653.000		1.653.000	0	0,8				
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	10		1		1		0								0		0		0					
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			224.061.832		174.434.200		17.852.000		413.000								413.000		413.000	0	0,18				
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	10		1		1		0								0		0		0					
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100		100		100		100								100		100		100					
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			6.385.681.707		933.632.867		796.982.265		160.623.000								160.623.000		160.623.000	0	2,52				
			Tersusunnya Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15		6		3		0								0		0		0					
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	15		6		3		0									0		0		0				
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	15		4		3		0									0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	15		4		3		0									0		0		0				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	30		9		6		0									0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	30		11		6		0									0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	30		12		6		0									0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	30		11		6		0									0		0		0				
		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			442.649.547		39.773.407		48.575.900		11.535.000								11.535.000		11.535.000	0	2,61				
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15		6		3		0								0		0		0					

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			340.013.332		18.193.100		37.743.800		5.948.000								5.948.000		5.948.000	0	1,75		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		15		6		3		0								0		0		0			
		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			269.913.332		24.156.700		16.431.900		6.398.000								6.398.000		6.398.000	0	2,37		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		15		4		3		0								0		0		0			
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			1.658.103.357		68.664.760		164.755.805		19.620.000								19.620.000		19.620.000	0	1,18		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		15		4		3		0								0		0		0			
		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			856.572.982		164.221.400		77.079.930		12.430.000								12.430.000		12.430.000	0	1,45		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		30		9		6		0								0		0		0			
		5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			302.593.082		29.060.600		44.021.900		14.804.000								14.804.000		14.804.000	0	4,89		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		30		11		6		0								0		0		0			
		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			212.593.082		38.004.000		17.901.900		3.135.000								3.135.000		3.135.000	0	1,47		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		30		12		6		0								0		0		0			
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			2.303.242.993		551.558.900		390.471.130		86.753.000								86.753.000		86.753.000	0	3,77		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		30		11		6		0								0		0		0			
		5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				15.744.334.941		-		1.101.110.144		86.402.990							86.402.990		86.402.990	0,41	0,55		
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				8.902.415.996		-		669.970.684		33.913.994							33.913.994		33.913.994	0	0,38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
		Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)	100		100		100		40								40		40		40				
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				1.010.829.892		-		95.329.170		12.851.794							12.851.794		12.851.794	0	1,27			
		Tersusunnya Laporan Desiminasi Prototype Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	16		0		0		0								0		0		0				
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)		4			0								0		0										
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)		5			0		1		0					0		0									
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				166.100.194		-		-		-						-		-	0	0				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	16		0		0		0							0		0		0				
		5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			271.877.074		-		-		-							-		-	0	0			
			Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	4		0		0									0		0		0				
		5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			572.852.624		-		95.329.170		12.851.794							12.851.794		12.851.794	0	2,24			
			Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5		0		1		0							0		0		0				
			Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100		100		100		0							0		0		0				
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			830.846.334		-		-		-							-		-	0	0			
			Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	1		0		0									0		0		0				
		5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi			830.846.334		-		-		-							-		-	0	0			
			Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	1		0		0									0		0		0				
			Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	100		100		100		0							0		0		0				
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			4.228.603.102		-		460.107.476		21.062.200							21.062.200		21.062.200	0	0,5			
			Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1		0		0									0		0		0				
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	5		0		1		0							0		0		0				
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5		0		1		0							0		0		0				
		5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			1.463.128.334		-		-		-							-		-	0	0			
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1		0		0									0		0		0				
		5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			1.380.362.384		-		235.656.738		15.058.600							15.058.600		15.058.600	0	1,09			
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	5		0		1		0							0		0		0				
		5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			1.385.112.384		-		224.450.738		6.003.600							6.003.600		6.003.600	0	0,43			
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5		0		1		0							0		0		0				
			Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	100		100		100		0							0		0		0				
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			2.832.136.668		-		114.534.038		-							-		-	0	0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5		0		1		0						0		0		0					
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1		0		0								0		0		0					
		5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1.377.612.384		-			114.534.038		-					-		-	0	0				
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5		0		1		0							0		0		0				
		5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			1.454.524.284		-			-		-					-		-	0	0				
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1		0		0									0		0		0				
		5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			6.841.918.945		-		431.139.460		52.488.996						52.488.996		52.488.996	0,6	0,77	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	100		0		100		0							0		0		0				
				Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan (%)	100		0		100		25							25		25		25				
		5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			551.542.610		-		53.549.170		-						-		-	0	0				
			Tersusunnya Laporan Publikasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	2		0		0									0		0		0				
				Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	15		0		3		0							0		0		0				
		5.05.03.2.01.0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			102.620.730		-		-		-						-		-	0	0				
			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	2		0		0									0		0		0				
		5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset			448.921.880		-		53.549.170		-						-		-	0	0				
			Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	15		0		3		0							0		0		0				
			Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	100		0		100		0							0		0		0				
		5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			1.093.377.870		-		-		-						-		-	0	0				
			Tersusunnya Laporan Publikasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	4		0		0									0		0		0				
				Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	1		0		0									0		0		0				
				Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	1		0		0									0		0		0				
		5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			179.639.102		-		-		-						-		-	0	0				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	%
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	4		0		0										0		0		0					
		5.05.03.2.01.0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			896.672.768		-		-		-		-						-		-	0	0				
			Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	1		0		0										0		0		0					
		5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				17.066.000		-		-		-							-		-	0	0				
			Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	1		0		0											0		0		0				
		Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	100		0		100		0									0		0		0					
		5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi				4.967.159.365		-		377.590.290		52.488.996							52.488.996		52.488.996	0,86	1,06				
			Tersusunnya Laporan Publikasi Ilmiah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5		0		1		0									0		0		0				
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	102		0		0												0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	8		0		0												0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	2		0		0												0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional (Laporan)	1		0		0												0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	4		0		0												0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	400		0		60		0										0		0		0			
				Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	4		0		0												0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	4		0		0												0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	10		0		2		0								0		0		0			
				Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan)	120		0		0										0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan)	350		0		50		42								42		42		12			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Laporan)	5		0		0										0		0		0			
		5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah			1.545.983.651		-		228.728.990		45.228.996							45.228.996		45.228.996	0	2,93			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5		0		1		0								0		0		0			
		5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi			695.959.252		-		-		-							-		-	0	0			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	102		0		0										0		0		0			
		5.05.03.2.02.0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)		250.410.722		-		-		-							-		-	0	0			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	8		0		0										0		0		0			
		5.05.03.2.02.0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah			90.410.722		-		-		-							-		-	0	0			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	2		0		0										0		0		0			
		5.05.03.2.02.0005	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional			100.000.000		-		-		-							-		-	0	0			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional (Laporan)	1		0		0										0		0		0			
		5.05.03.2.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi			60.660.722		-		-		-							-		-	0	0			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	4		0		0										0		0		0			
		5.05.03.2.02.0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi			288.532.372		-		72.190.000		1.800.000							1.800.000		1.800.000	0	0,62			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	400		0		60		0								0		0		0			
		5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah			88.662.667		-		-		-							-		-	0	0			

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	:

NOTULEN RAPAT 26 MARET 2026

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, terhadap indikator kinerja yang telah mencapai target, direkomendasikan untuk tidak melakukan replikasi target pada tahun rencana ini. Sebaliknya, wajib dilakukan eskalasi target secara terukur. Langkah ini penting guna memastikan peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah secara terus-menerus.

Memprioritaskan alokasi sumber daya dan dukungan anggaran pada sub-kegiatan yang mengalami peningkatan target, yang dibarengi dengan komitmen penciptaan inovasi pelayanan atau simplifikasi proses bisnis.

Dalam rangka menjamin peningkatan kinerja yang berkelanjutan, penyusunan target dalam Rencana Kerja (Renja) tidak boleh lagi sekadar mereplikasi angka tahun-tahun sebelumnya. Target-target program dan kegiatan yang berkorelasi langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan telah dinyatakan tercapai

NOTULEN CAPAIAN KINERJA 2026 TRIWULAN I
BAPPERIDA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BRIPDA) Kabupaten Lombok Tengah untuk periode Triwulan I (TW I) Tahun 2026 termasuk sangat rendah.

Secara keseluruhan, kinerja TW I berada pada level yang perlu ditingkatkan secara signifikan. Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan: 17,34%.

Evaluasi berdasarkan program-program utama menunjukkan hasil yang bervariasi. –

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan rata-rata memiliki capaian kinerja sub kegiatan sebesar 17,20%
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang lebih baik dengan rata-rata capaian sub kegiatan mencapai 50,00%
- Program Riset dan Inovasi Daerah, capaian rata-rata kinerjanya sangat rendah, yakni hanya 1,51% dengan predikat Sangat Rendah

Namun, rendahnya serapan keuangan (10,68%) dibandingkan dengan rata-rata kinerja fisik (17,34%) menunjukkan adanya tantangan dalam sinkronisasi antara penyelesaian aktivitas fisik dan proses administrasi keuangan di awal tahun anggaran

BAPPERIDA perlu melakukan percepatan pelaksanaan program, terutama pada sub kegiatan yang masih menunjukkan angka 0% agar target tahunan yang tercantum dalam Renja dan Renstra dapat tercapai tepat waktu pada triwulan-triwulan berikutnya.

Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kondisi Sampai Dengan : Triwulan II Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program / Kegiatan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.305.274	16,67	119.857.300	50,94
2	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.085.996.573	50,00	441.633.615	7,26
3	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.387.800	50,00	7.248.000	32,37
4	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.913.300	25,00	18.867.000	45,01
5	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.926.438	12,50	94.130.318	34,74
6	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	255.719.010	60,00	231.673.998	90,60
7	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.352.000	100,00	35.000.000	40,53
8	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.220.040	0,00	-	0,00
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
9	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	402.390.820	100,00	234.833.724	58,36
10	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	181.466.640	0,00	19.300.340	10,64
11	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	588.201.050	37,50	62.100.080	10,56
12	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	26.989.870	0,00	13.790.440	51,09
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
13	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	796.982.265	12,50	286.079.220	35,90
14	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	917.514.518	12,50	202.209.928	22,04
15	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	472.909.995	0,00	128.313.850	27,13
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
16	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-		-	0,00
17	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	460.107.476	0,00	53.720.248	11,68
18	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	114.534.038	0,00	14.229.668	12,42
19	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	95.329.170	0,00	17.707.794	18,58
	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				
20	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	53.549.170	0,00	-	0,00
21	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	377.590.290	33,50	108.163.996	28,65
	TOTAL		11.592.385.737	26,99	2.088.859.519	18,02

Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kondisi Sampai Dengan : Triwulan II Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.104.820.435	0,00	31,20	948.410.231	13,35
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.199.048.380	100,00	64,58	330.024.584	27,52
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.187.406.778	100,00	8,33	616.602.998	28,19
4	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	669.970.684	15,00	0,00	85.657.710	12,79
5	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	431.139.460	20,00	26,80	108.163.996	25,09
	TOTAL		11.592.385.737	47,50	26,99	2.088.859.519	18,02

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01	PERENCANAAN			66.453.503.990		11.258.631.097		10.491.275.593		1.151.187.049		743.850.764					1.895.037.813		1.895.037.813	7,3	2,85			
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			42.198.850.000		7.572.270.532		7.104.820.435		709.342.289		239.067.942					948.410.231		948.410.231	10,3	2,25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
			Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100		100		100		0		0					0		0		0				
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.176.198.275		340.950.120		235.305.274		52.646.000		67.211.300					119.857.300		119.857.300	2,67	5,51			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21		1		4		2		0					0		0		0		0		
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60		1		12		0		6					6		6						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		5		1		0		0					0		0						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	4		0		0		0		0					0		0						
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5		0		1		0		0					0		0						
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	6		2		1		0		1					1		1						
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			350.601.873		154.994.320		39.663.128		5.801.000		8.254.000					14.055.000		14.055.000	0	4,01			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21		1		4		2		0					0		0		0				
		5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			201.830.668		23.900.800		29.030.678		-		11.252.000					11.252.000		11.252.000	0	5,57			
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0				
		5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			195.408.732		43.520.900		39.730.678		-		19.873.800					19.873.800		19.873.800	0	10,17			
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			189.874.590		28.760.800		13.624.940		13.615.000		-					13.615.000		13.615.000	0	7,17			
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5			1		1		0		0					0		0		0			
		5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			209.373.777		16.220.500		19.356.750		-		7.996.500					7.996.500		7.996.500	0	3,82			
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5			1		1		0		0					0		0		0			
		5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			295.711.870		37.927.600		48.529.350		25.505.000		8.673.000					34.178.000		34.178.000	10	11,56			
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60			1		12		0		6					6		6		10			
		5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			330.684.737		23.382.700		33.887.850		7.725.000		2.790.000					10.515.000		10.515.000	0	3,18			
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5			5		1		0		0					0		0		0			
		5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			259.622.831		-		-		-		-					-		-	0	0			
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	4			0		0		0		0					0		0		0			
		5.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			87.772.398		-		3.685.950		-		2.485.000					2.485.000		2.485.000	0	2,83			
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5			0		1		0		0					0		0		0			
		5.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			55.316.799		12.242.500		7.795.950		-		5.887.000					5.887.000		5.887.000	16,67	10,64			
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	6			2		1		0		1					1		1		16,67			
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32.375.875.296		6.213.749.101		6.085.996.573		415.031.291		26.602.324					441.633.615		441.633.615	36,67	1,36			
			Terlaksananya Manajemén Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		12		60		60		60						60		60		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0				0		0		0					
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	90		18		18		0		9				9		9		10					
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			31.560.595.202		6.110.479.861		6.044.762.503		411.190.291		19.042.324					430.232.615		430.232.615	100	1,36					
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		12		60		60		60						60		60		100					
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			259.511.855		12.497.900		10.516.270		-		-					-		-	0	0					
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0					
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			555.768.239		90.771.340		30.717.800		3.841.000		7.560.000					11.401.000		11.401.000	10	2,05					

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	90		18		18		0		9						9		9		10			
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			193.443.790		17.574.000		22.387.800		-		7.248.000					7.248.000		7.248.000		10	3,75		
			Terlaksananya Manajemen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		1						1		1		20			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0				0									
		5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			81.890.085		12.024.000		11.451.900		-		6.648.000					6.648.000		6.648.000		20	8,12		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		1						1		1		20			
		5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			111.553.705		5.550.000		10.935.900		-		600.000					600.000		600.000		0	0,54		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0			
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			297.917.256		35.010.500		41.913.300		8.055.000		10.812.000					18.867.000		18.867.000		5	6,33		
			Terlaksananya Manajemen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	60		1		12		0		6				6		10							
		5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			125.155.552		18.537.000		21.977.850		4.910.000		4.500.000					9.410.000		9.410.000		0	7,52		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0			
		5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			172.761.704		16.473.500		19.935.450		3.145.000		6.312.000					9.457.000		9.457.000		10	5,47		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	60		1		12		0		6						6		6		10			
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.682.066.366		274.324.429		270.926.438		37.990.000		56.140.318					94.130.318		94.130.318		2,5	3,51		
			Terlaksananya Manajemen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		1		0		0						0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		3		1		0		0						0		0					
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	240		2		48		0		24						24		24		10			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0			
		5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			233.889.591		20.146.500		21.546.438		3.474.000		5.211.000					8.685.000		8.685.000		0	3,71		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		1		0		0						0		0		0			
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			541.680.292		51.477.300		42.269.088		5.996.000		12.130.000					18.126.000		18.126.000		0	3,35		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		3		1		0		0						0		0		0			
		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.855.930.483		198.399.629		202.672.532		28.520.000		38.799.318					67.319.318		67.319.318		10	3,63		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	240		2		48		0		24						24		24		10			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket						
								I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			50.566.000		4.301.000		4.438.380		-		-					-		-	0	0			
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0					
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.147.519.165		531.267.300		255.719.010		174.619.998		57.054.000					231.673.998		231.673.998	0,37	7,36			
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	117		0		0		0		0					0		0		0		0		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2845		2		5		5		0					5		5		0,18				
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	305		3		5		4		0					4		4		1,31				
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	68		3		1		0		0					0		0		0				
		5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			475.187.200		-		-		-		-					-		-	0	0			
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	117		0		0		0		0					0		0		0				
		5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			506.548.640		68.275.000		60.000.000		-		57.054.000					57.054.000		57.054.000	0,18	11,26			
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2845		2		5		5		0					5		5		0,18				
		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.234.673.413		255.766.300		185.639.850		174.619.998		-					174.619.998		174.619.998	1,31	14,14			
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	305		3		5		4		0					4		4		1,31				
		5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			931.109.912		207.226.000		10.079.160		-		-					-		-	0	0			
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	68		3		1		0		0					0		0		0				
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			270.000.000		-		86.352.000		21.000.000		14.000.000					35.000.000		35.000.000	100	12,96			
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14		0		14		14		14					14		14		100				
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			270.000.000		-		86.352.000		21.000.000		14.000.000					35.000.000		35.000.000	100	12,96			
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14		0		14		14		14					14		14		100				
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.055.829.852		159.395.082		106.220.040		-		-					-		-	0	0			
			Terlaksananya Pemeliharaan BMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		17		22		0		0					0		0		0		0		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			139	0		0		0		0						0	0		0						
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		159.395.082		106.220.040		-		-					-		-	0	0			
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		17		22		0		0					0		0		0				
		5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.055.829.852		-		-		-		-					-		-	0	0			
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	139		0		0		0		0					0		0		0				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			8.654.295.000		1.251.870.613		1.199.048.380		198.332.710		131.691.874						330.024.584		330.024.584	11,81	3,81	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100		100		100		100							100		100		100				
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100		100		100		100		100													
				Kesesuaian antara RKP dengan APBD (%)	100		100		100		100		100													
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			3.989.950.215		963.643.128		402.390.820		150.866.190		83.967.534					234.833.724		234.833.724	18,1	5,89				
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	6		1		1		1		0							1		1		16,67			
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	15		2		3		0		2						2	2		13,33					
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	6		2		1		1		0						1	1		16,67					
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	6		2		1		2		0						2	2		33,33					
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	10		2		2		1		1						2	2		20					
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1720		344		344		344		0						344	344		20					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	15		3		3		0		1						1	1		6,67					
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			879.679.134		287.369.803		37.930.350		22.715.850		270.600					22.986.450		22.986.450	16,67	2,61				
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	6		1		1		1		0						1		1		16,67				
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			514.039.394		29.109.400		38.266.478		4.306.470		11.584.500						15.890.970		15.890.970	13,33	3,09			
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	15		2		3		0		2						2		2		13,33				
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			555.431.864		46.626.000		83.514.066		58.354.550		-						58.354.550		58.354.550	16,67	10,51			
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	6		2		1		1		0						1		1		16,67				
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			163.012.354		44.131.100		23.319.804		23.031.760		282.900						23.314.660		23.314.660	33,33	14,3			
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	6		2		1		2		0						2		2		33,33				
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			871.257.229		201.595.000		114.732.762		35.257.560		40.384.284						75.641.844		75.641.844	20	8,68			
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	10		2		2		1		1						2		2		20				
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			342.905.439		38.903.000		12.240.000		7.200.000		-						7.200.000		7.200.000	20	2,1			
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1720		344		344		344		0						344		344		20				
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			663.624.801		315.908.825		92.387.360		-		31.445.250						31.445.250		31.445.250	6,67	4,74			
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	15		3		3		0		1						1		1		6,67				
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.006.487.618		111.645.300		181.466.640		8.131.340		11.169.000						19.300.340		19.300.340	0	1,92			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	10		2		2		0		0					0		0		0				
				Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	225		30		45		0		0					0		0		0				
		5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			783.000.084		107.320.000		146.051.800		-		-				-		-		0	0			
			Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	10		2		2		0		0					0		0		0				
		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			223.487.534		4.325.300		35.414.840		8.131.340		11.169.000				19.300.340		19.300.340		0	8,64			
			Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	225		30		45		0		0					0		0		0				
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			3.361.674.083		170.342.685		588.201.050		39.335.180		22.764.900				62.100.080		62.100.080		7,5	1,85			
			Tersusunnya Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	20		4		4		1		0					1		1		5				
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	20		4		4		1		1					2		2		10				
		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			2.341.715.999		31.862.900		442.937.100		4.711.900		22.482.000				27.193.900		27.193.900		5	1,16			
			Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	20		4		4		1		0					1		1		5				
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			1.019.958.084		138.479.785		145.263.950		34.623.280		282.900				34.906.180		34.906.180		10	3,42			
			Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	20		4		4		1		1					2		2		10				
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			296.183.084		6.239.500		26.989.870		-		13.790.440				13.790.440		13.790.440		0	4,66			
			Tersusunnya Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0				
		5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			296.183.084		6.239.500		26.989.870		-		13.790.440				13.790.440		13.790.440		0	4,66			
			Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0				
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			15.600.358.990		2.434.489.952		2.187.406.778		243.512.050		373.090.948				616.602.998		616.602.998		1,67	3,95	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100		100		100		100		100					100		100		100				
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			5.427.350.252		831.541.825		917.514.518		56.877.500		145.332.428				202.209.928		202.209.928		2,5	3,73			
			Tersusunnya Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	25		1		5		0		0					0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	25		1		5		5		0					5		5		20				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	25		1		5		0		0					0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	25		1		5		0		0					0		0		0				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15		1		3		0		0					0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	15		1		3		0		0					0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	15		1		3		0		0					0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	15		1		3		0		0					0		0		0				
		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			312.543.352		85.233.410		132.286.760		12.100.000		25.359.178					37.459.178		37.459.178	0	11,99			
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	25		1		5		0		0					0		0		0				
		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			289.773.392		25.491.600		52.139.060		8.530.000		6.655.000					15.185.000		15.185.000	20	5,24			
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	25		1		5		5		0					5		5		20				
		5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			198.678.477		9.194.200		44.438.460		6.565.000		-					6.565.000		6.565.000	0	3,3			
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	25		1		5		0		0					0		0		0				
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			1.508.857.302		319.097.500		462.686.190		20.774.900		88.989.250					109.764.150		109.764.150	0	7,27			
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	25		1		5		0		0					0		0		0				
		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			721.250.662		27.781.215		25.822.170		2.400.000		5.977.000					8.377.000		8.377.000	0	1,16			
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15		1		3		0		0					0		0		0				
		5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			212.271.362		12.870.300		21.954.060		4.500.000		5.005.000					9.505.000		9.505.000	0	4,48			
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	15		1		3		0		0					0		0		0				
		5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			142.681.362		14.043.400		28.649.060		1.116.000		-					1.116.000		1.116.000	0	0,78			
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	15		1		3		0		0					0		0		0				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket						
								I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			2.041.294.343		337.830.200		149.538.758		891.600		13.347.000					14.238.600		14.238.600	0	0,7			
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	15		1		3		0		0						0		0		0			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100			
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			3.787.327.031		669.315.260		472.909.995		26.011.550		102.302.300					128.313.850		128.313.850	0	3,39			
			Tersusunnya Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15		1		1		0		0					0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		1		1		0		0					0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		1		1		0		0					0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		1		1		0		0					0		0		0				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	10		1		1		0		0					0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	10		1		1		0		0					0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	10		1		1		0		0					0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	10		1		1		0		0					0		0		0				
		5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			266.242.782		59.978.660		44.940.195		3.019.000		14.566.800					17.585.800		17.585.800	0	6,61			
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15		1		1		0		0					0		0		0				
		5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			366.242.782		25.278.400		50.294.005		3.600.000		12.015.000					15.615.000		15.615.000	0	4,26			
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		1		1		0		0					0		0		0				
		5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			221.268.807		27.426.800		18.221.895		3.356.600		-					3.356.600		3.356.600	0	1,52			
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		1		1		0		0					0		0		0				
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			1.468.606.882		27.324.800		251.559.810		5.670.550		50.372.500					56.043.050		56.043.050	0	3,82			
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		1		1		0		0					0		0		0				
		5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			266.284.782		20.251.600		26.025.990		4.519.400		7.011.000					11.530.400		11.530.400	0	4,33			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	10		1		1		0		0					0		0		0					
	5.01.03.2.03.0006		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			767.900.857		317.042.900		48.921.305		3.780.000		17.247.000					21.027.000		21.027.000		0	2,74			
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	10			1		1		0		0					0		0		0				
	5.01.03.2.03.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			206.718.307		17.577.900		15.094.795		1.653.000		1.090.000					2.743.000		2.743.000		0	1,33			
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	10			1		1		0		0					0		0		0				
	5.01.03.2.03.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			224.061.832		174.434.200		17.852.000		413.000		-					413.000		413.000		0	0,18			
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	10			1		1		0		0					0		0		0				
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100			100		100		100		100					100		100		100				
	5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			6.385.681.707		933.632.867		796.982.265		160.623.000		125.456.220					286.079.220		286.079.220		2,5	4,48			
			Tersusunnya Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15		6		3		0		3						3		3		20				
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)		15	6		3		0		0				0				0								
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)		15	4		3		0		0				0				0								
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)		15	4		3		0		0				0				0								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		30	9		6		0		0				0				0								
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		30	11		6		0		0				0				0								
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		30	12		6		0		0				0				0								
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		30	11		6		0		0				0				0								
		5.01.03.2.01.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			442.649.547		39.773.407		48.575.900		11.535.000		18.513.220					30.048.220		30.048.220		20	6,79		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15		6		3		0		3					3		3		20				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			340.013.332		18.193.100		37.743.800		5.948.000		16.142.000						22.090.000		22.090.000	0	6,5			
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		15			6		3		0		0						0		0	0				
		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			269.913.332		24.156.700		16.431.900		6.398.000		5.525.000							11.923.000		11.923.000	0	4,42		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		15			4		3		0		0						0		0	0				
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			1.658.103.357		68.664.760		164.755.805		19.620.000		10.095.000							29.715.000		29.715.000	0	1,79		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		15			4		3		0		0						0		0	0				
		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			856.572.982		164.221.400		77.079.930		12.430.000		23.430.000							35.860.000		35.860.000	0	4,19		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		30			9		6		0		0						0		0	0				
		5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			302.593.082		29.060.600		44.021.900		14.804.000		15.086.000							29.890.000		29.890.000	0	9,88		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		30			11		6		0		0						0		0	0				
		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			212.593.082		38.004.000		17.901.900		3.135.000		5.265.000							8.400.000		8.400.000	0	3,95		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		30			12		6		0		0						0		0	0				
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			2.303.242.993		551.558.900		390.471.130		86.753.000		31.400.000							118.153.000		118.153.000	0	5,13		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		30			11		6		0		0						0		0	0				
		5.05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			15.744.334.941		-		1.101.110.144		86.402.990		107.418.716						193.821.706		193.821.706	0,76	1,23		
5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			8.902.415.996		-		669.970.684		33.913.994		51.743.716						85.657.710		85.657.710	0	0,96	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
		Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)	100		100		100		40		60						60		60	60					
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			1.010.829.892		-		95.329.170		12.851.794		4.856.000						17.707.794		17.707.794	0	1,75			
			Tersusunnya Laporan Desiminasi Prototype Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	16		0		0		0		0					0		0	0						
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	4		0		0		0		0				0		0	0							
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5		0		1		0		0				0		0	0							
5.05.02.2.04.0001		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			166.100.194		-		-		-		-					-		-	0	0					

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	%
			Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	16		0		0		0		0						0		0		0					
		5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			271.877.074		-		-		-		-						-		-	0	0				
			Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	4		0		0			0								0		0		0				
		5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			572.852.624		-		95.329.170		12.851.794		4.856.000							17.707.794		17.707.794	0	3,09			
			Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5		0		1		0			0							0		0		0			
			Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100		100		100		0		0						0		0		0					
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			830.846.334		-		-		-		-						-		-	0	0				
			Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	1		0		0			0							0		0		0					
		5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi			830.846.334		-		-		-		-						-		-	0	0				
			Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	1		0		0			0								0		0		0				
			Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	100		100		100		0		0						0		0		0					
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			4.228.603.102		-		460.107.476		21.062.200		32.658.048						53.720.248		53.720.248	0	1,27				
			Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1		0		0			0							0		0		0					
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	5		0		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5		0		1		0		0					0		0		0		0				
		5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			1.463.128.334		-		-		-		-						-		-	0	0				
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1		0		0			0								0		0		0				
		5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			1.380.362.384		-		235.656.738		15.058.600		16.655.774						31.714.374		31.714.374	0	2,3				
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	5		0		1		0		0							0		0		0				
		5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			1.385.112.384		-		224.450.738		6.003.600		16.002.274							22.005.874		22.005.874	0	1,59			
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5		0		1		0		0								0		0		0			
				Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	100		100		100		0		0							0		0		0			
			5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			2.832.136.668		-		114.534.038		-		14.229.668							14.229.668		14.229.668	0	0,5		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1		0		0				0				0		0							
		5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1.377.612.384		-		114.534.038		-		14.229.668					14.229.668		14.229.668	0	1,03			
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0			
		5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			1.454.524.284		-		-		-		-					-		-	0	0			
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1		0		0				0						0		0		0			
		5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			6.841.918.945		-		431.139.460		52.488.996		55.675.000					108.163.996		108.163.996	1,1	1,58	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	100		0		100		0		50					50		50		50		50		
				Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan (%)	100		0		100		25		50			50		50		50						
		5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			551.542.610		-		53.549.170		-		-				-		-	0	0				
			Tersusunnya Laporan Publikasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	2		0		0			0					0		0		0		0			
Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	15			0		3		0		0		0			0		0									
		5.05.03.2.01.0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			102.620.730		-		-		-		-				-		-	0	0				
			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	2		0		0				0					0		0		0				
		5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset			448.921.880		-		53.549.170		-		-				-		-	0	0				
			Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	15		0		3		0		0					0		0		0				
			Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	100		0		100		0		0					0		0		0				
		5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			1.093.377.870		-		-		-		-				-		-	0	0				
			Tersusunnya Laporan Publikasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	4		0		0			0					0		0		0					
				Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	1		0		0			0			0		0									
				Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	1		0		0			0			0		0									
		5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			179.639.102		-		-		-		-				-		-	0	0				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	4		0		0				0						0		0					
		5.05.03.2.01.0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			896.672.768		-		-		-		-					-		-	0	0			
			Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	1		0		0				0						0		0					
		5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				17.066.000		-		-		-		-				-		-	0	0			
			Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	1		0		0				0						0		0					
		Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	100		0		100		0		0						0		0						
		5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi				4.967.159.365		-		377.590.290		52.488.996		55.675.000				108.163.996		108.163.996	1,57	2,18			
			Tersusunnya Laporan Publikasi Ilmiah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	102		0		0				0				0									
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	8		0		0				0				0									
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	2		0		0				0				0									
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional (Laporan)	1		0		0				0				0									
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	4		0		0				0				0									
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	400		0		60				0				0									
				Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	4		0		0				0				0									
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	4		0		0				0				0									

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	10		0		2		0		1						1		1		10			
				Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	1		0		0				0						0		0		0			
				Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan)	120		0		0				0						0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan)	350		0		50		42		0						42		42		12			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Laporan)	5		0		0				0						0		0		0			
		5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah			1.545.983.651		-		228.728.990		45.228.996		28.885.000					74.113.996		74.113.996	0	4,79			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0			
		5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi			695.959.252		-		-		-		-					-		-	0	0			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	102		0		0				0						0		0		0			
		5.05.03.2.02.0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah			250.410.722		-		-		-		-					-		-	0	0			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	8		0		0				0						0		0		0			
		5.05.03.2.02.0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah			90.410.722		-		-		-		-					-		-	0	0			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	2		0		0				0						0		0		0			
		5.05.03.2.02.0005	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional			100.000.000		-		-		-		-					-		-	0	0			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional (Laporan)	1		0		0				0						0		0		0			
		5.05.03.2.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi			60.660.722		-		-		-		-					-		-	0	0			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	4		0		0				0						0		0		0			
		5.05.03.2.02.0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi			288.532.372		-		72.190.000		1.800.000		7.200.000					9.000.000		9.000.000	0	3,12			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	400		0		60		0		0						0		0		0			
		5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah			88.662.667		-		-		-		-					-		-	0	0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket						
								I		II		III		IV				13				14 = 13		15=14/6 x100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
			Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	4		0		0				0					0		0		0					
		5.05.03.2.02.0010	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat			90.410.722		-		-		-		-					0		-		0	0			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	4		0		0				0						0		0		0				
		5.05.03.2.02.0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi			306.710.722		-		27.471.300		4.260.000		6.690.000					10.950.000		10.950.000	10	3,57				
			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	10		0		2		0		1						1		1		10				
		5.05.03.2.02.0018	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi			612.915.647		-		-		-		-					-		-	0	0				
			Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	1		0		0				0						0		0		0				
		5.05.03.2.02.0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi			110.280.722		-		-		-		-					-		-	0	0				
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan)	120		0		0				0						0		0		0				
		5.05.03.2.02.0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi			204.410.722		-		49.200.000		1.200.000		12.900.000					14.100.000		14.100.000	12	6,9				
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan)	350		0		50		42		0						42		42		12				
		5.05.03.2.02.0024	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah			521.810.722		-		-		-		-					-		-	0	0				
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Laporan)	5		0		0				0						0		0		0				
			Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	100		0		100		0		0						0		0		0				
		5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			229.839.100		-		-		-		-					-		-	0	0				
			Tersusunnya Laporan Publikasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0				
		5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			229.839.100		-		-		-		-					-		-	0	0				
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0				
			JUMLAH			82.197.838.931		11.258.631.097		11.592.385.737		1.237.590.039		851.269.480					2.088.859.519		2.088.859.519						
			Rata-rata capaian kinerja (%)																			5,24	2,54				
			Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	:

NOTULEN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II
BAPPERIDA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Evaluasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan Triwulan II (TW II) Tahun 2026 membutuhkan akselerasi yang serius

Meskipun terdapat peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, kinerja BAPPERIDA pada TW II secara keseluruhan masih dikategorikan dalam predikat yang rendah. Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan: 26,99%.

Pencapaian Indikator Program: Rata-rata mencapai 47,50%

Evaluasi berdasarkan program utama menunjukkan kemajuan, namun banyak lainnya yang masih stagnan.

Perbandingan dengan Triwulan I, terdapat pertumbuhan yang konsisten namun belum cukup pesat:

Predikat kinerja tidak berubah, tetap berada pada kategori "Sangat Rendah"

Kinerja BAPPERIDA hingga pertengahan tahun 2026 masih membutuhkan akselerasi yang serius. Kesenjangan capaian kinerja pada beberapa sub kegiatan . Diperlukan percepatan pelaksanaan terutama pada program penelitian dan pengembangan yang hingga akhir TW II belum menunjukkan progress sama sekali.



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah BAPPERIDA LOMBOK TENGAH

Rekapitulasi Monev Bapperida

No	OPD	Jumlah Pagu (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	(%)	Predikat	Rata-Rata Indikator (%)	Predikat
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	995.808.684.574	989.510.573.652	99	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	338.627.480.298	332.973.087.225	98	Sangat Tinggi	95	Sangat Tinggi
3	Rumah Sakit Umum Daerah	162.454.668.508	168.667.055.113	104	Sangat Tinggi	73	Sedang
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	186.936.382.084	196.204.942.534	105	Sangat Tinggi	86	Tinggi
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	59.888.011.553	59.451.521.201	99	Sangat Tinggi	93	Sangat Tinggi
6	Satuan Polisi Pamong Praja	14.718.668.684	13.794.605.551	94	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.701.654.355	5.209.016.530	91	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
8	Dinas Sosial	7.876.498.544	7.352.614.747	93	Sangat Tinggi	82	Tinggi
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.140.615.832	10.880.536.584	98	Sangat Tinggi	81	Tinggi
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	16.020.333.976	8.941.672.342	56	Rendah	99	Sangat Tinggi
11	Dinas Ketahanan Pangan	6.202.357.528	6.062.158.781	98	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
12	Dinas Lingkungan Hidup	13.190.610.009	11.919.249.963	90	Tinggi	98	Sangat Tinggi
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.053.627.844	6.185.939.052	88	Tinggi	100	Sangat Tinggi
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.157.154.695	8.968.755.230	98	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
15	Dinas Perhubungan	22.474.914.167	21.023.837.004	94	Sangat Tinggi	95	Sangat Tinggi
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.941.691.787	8.048.466.286	90	Tinggi	97	Sangat Tinggi
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah	13.211.391.629	13.063.685.663	99	Sangat Tinggi	85	Tinggi
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.739.395.252	5.497.154.480	96	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	21.668.195.249	21.284.427.172	98	Sangat Tinggi	99	Sangat Tinggi
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	8.524.687.309	8.276.238.585	97	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.275.947.052	10.100.549.358	98	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

BAPPERIDA LOMBOK TENGAH

No	OPD	Jumlah Pagu (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	(%)	Predikat	Rata-Rata Indikator (%)	Predikat
22	Dinas Pariwisata	14.305.711.571	7.588.500.170	53	Rendah	95	Sangat Tinggi
23	Dinas Pertanian	81.033.929.530	78.514.096.990	97	Sangat Tinggi	89	Tinggi
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.061.897.742	23.404.962.167	97	Sangat Tinggi	88	Tinggi
25	Sekretaris Daerah	38.752.623.808	37.421.349.034	97	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
26	Sekretariat DPRD	59.638.529.696	61.715.093.462	103	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
27	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	13.560.456.165	10.997.491.060	81	Tinggi	100	Sangat Tinggi
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	444.129.609.554	418.028.353.372	94	Sangat Tinggi	95	Sangat Tinggi
29	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	30.393.020.566	25.652.015.710	84	Tinggi	97	Sangat Tinggi
30	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8.893.479.803	8.237.175.293	93	Sangat Tinggi	95	Sangat Tinggi
31	Inspektorat	20.772.903.343	20.065.659.964	97	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
32	Kecamatan Praya	21.849.021.156	21.006.979.351	96	Sangat Tinggi	97	Sangat Tinggi
33	Kecamatan Praya Tengah	8.123.168.235	8.456.757.709	104	Sangat Tinggi	96	Sangat Tinggi
34	Kecamatan Praya Barat	2.868.775.023	2.261.643.102	79	Tinggi	100	Sangat Tinggi
35	Kecamatan Praya Barat Daya	2.753.028.576	2.665.300.106	97	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
36	Kecamatan Praya Timur	2.596.691.270	3.502.007.864	135	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
37	Kecamatan Pujut	3.609.799.504	3.439.020.697	95	Sangat Tinggi	99	Sangat Tinggi
38	Kecamatan Janapria	3.122.505.845	2.765.045.952	89	Tinggi	81	Tinggi
39	Kecamatan Kopang	2.451.263.348	2.047.607.224	84	Tinggi	58	Rendah
40	Kecamatan Batukliang	2.281.313.429	2.199.583.332	96	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
41	Kecamatan Batukliang Utara	2.372.474.488	1.934.907.348	82	Tinggi	77	Tinggi
42	Kecamatan Pringgarata	3.057.603.331	3.006.366.987	98	Sangat Tinggi	98	Sangat Tinggi
43	Kecamatan Jonggat	2.833.632.579	2.731.262.816	96	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7.776.308.517	7.773.827.145	100	Sangat Tinggi	105	Sangat Tinggi
45	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.937.620.976	9.615.436.812	97	Sangat Tinggi	96	Sangat Tinggi